

ISSN 1411-2930

Bulletin Somba Opu

VOL. 18 NO. 22 MEI 2015



BALAI PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA MAKASSAR

Somba Opu

Salam Redaksi

Diterbitkan oleh
Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar
Penanggungjawab
Andi Muhammad Said

Redaktur
Muhammad Ramli

Penyunting/Editor
Mohammad Natsir

Fotografer / Desainer
Alauddin

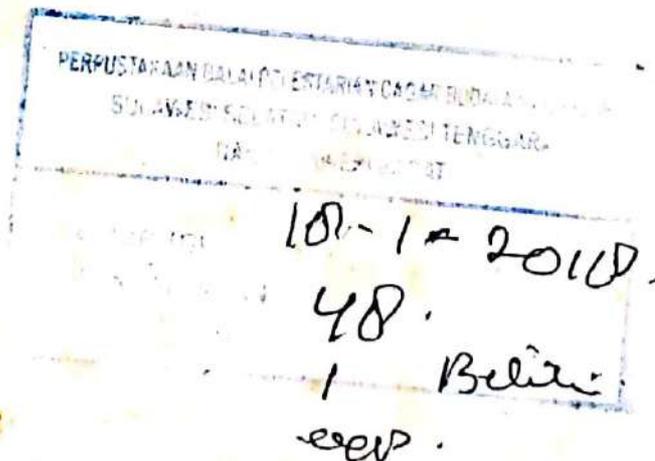
Sekretariat
Emmy Syahrani
Amir Djambia
Hasan Mangendek

Alamat Redaksi
Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar,
Kompleks Benteng Ujung Pandang,
Jl. Ujung Pandang No.1 Makassar-90111
Telepon
(0411)-3631117, Fax. (0411)-3621702

sombaopubulletin@yahoo.co.id

Sejak terbit pertama kali pada 1997, Bulletin Somba Opu (BSO) terus berbenah diri dalam upaya menyampaikan informasi aktual dan terpercaya seputar dinamika pelestarian cagar budaya, aspek-aspek teoritis dan gagasan-gagasan baru dalam wacana keilmuan, baik humaniora maupun ilmu-ilmu sosial. Semua itu kami lakukan hanya untuk memberikan bacaan yang bermutu bagi para pembaca BSO. Memang tidak mudah memenuhi harapan publik untuk menyuarakan dan menghadirkan kembali gagasan kreatif tersebut melalui media yang sederhana ini. Dibutuhkan "semangat" untuk bisa menerobos dan menelikung keluar dari frame tradisi yang ada, yang hanya membolehkan persoalan-persoalan teknis, program dan hasil kegiatan yang bias ditampilkan. Dengan begini, maka keinginan bersama untuk membangun sebuah "kekuatan" berilmu, menyusun rencana dan standar operasional prosedur yang tepat dalam pengelolaan cagar budaya dapat mencapai tujuan. Kini, ditengah keriuhan kontestasi kekuasaan, hegemoni wacana menyangkut peningkatan pendapatan daerah melalui model pemanfaatan sumber daya alam dan budaya, penataan ruang perkotaan yang makin menegaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, menjadi tantangan bagi para pakar, praktisi dan pemerhati budaya untuk memberikan tekanan agar perencanaan pembangunan, semangat mengeksploitasi sumber daya alam dilaksanakan beriringan dengan keinginan untuk menghijaukan lingkungan, melestarikan situs dan kawasan cagar budaya sekitarnya.

Selamat membaca!



DAFTAR ISI

1. Selat Makassar "The Ship Wreck Site"	
<i>Andriany</i>	1
2. Implementasi Perda Cagar Budaya Kota Palopo di Era Otonomi Daerah	
<i>Yadi Mulyadi</i>	16
3. Potensi Sumber Daya Arkeologi Bawah Air untuk Pengembangan Ekowisata Bahari	
<i>Chunjunarsi</i>	27
4. Bangunan Kolonial Belanda di Malino Kabupaten Gowa	
<i>Arsandi</i>	39
5. Konsepsi Konservasi Perkotaan	
<i>Asmunandar</i>	52
6. Bahan Alami sebagai Alternatif Perawatan Cagar Budaya	
<i>Mustafa</i>	61
7. Pemanfaatan Sumber Daya Arkeologi sebagai Objek Pariwisata di Balla Peu Mamasa	
<i>Fatriani Fara</i>	77

SELAT MAKASSAR “THE SHIP WRECK SITE”

Oleh Andriyani

Pengantar

Sebelum memulai pembahasan berdasarkan judul diatas, akan dijelaskan arti dari kalimat berbahasa asing yang tertera pada judul yaitu “*The Ship wreck site*”, yang bermakna situs bangkai kapal karam. Mengapa penulis menggunakan istilah tersebut ? karena saat ini kalimat tersebut sedang populer dibicarakan di kancah arkeologi internasional seiring maraknya penemuan-penemuan situs bawah air yang mengandung nilai ekonomis tinggi. The ship wreck site adalah bagian dari peninggalan arkeologi khususnya arkeologi bawah air¹ yang memiliki nilai sejarah yang penting bagi ilmu pengetahuan dan penguatan jati diri bangsa serta dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan beberapa kepentingan komersial lainnya. Karena pentingnya nilai yang dikandungnya, maka The ship wreck site ini perlu untuk dilestarikan dengan cara dilindungi dan dimanfaatkan secara tepat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai amanah Undang-undang². (Data tentang Ship wreck site bersumber dari Balai Pelestarian Cagar Budaya/ BPCB Makassar, sehingga tulisan ini didominasi oleh lokasi ship wreck site yang berada di wilayah kerja BPCB Makassar).

Subjek tulisan ini adalah tentang Selat Makassar, yang menjadi penting artinya karena menjadi *lokus* tempat ditemukannya The ship wreck site/ situs bangkai kapal karam, sebagai salah satu sumber data arkeologis.

-
1. Arkeologi bawah air adalah bagian dari disiplin ilmu arkeologi yang mempelajari kehidupan manusia masa lampau dengan memanfaatkan peninggalan fisik (situs, struktur dan artefak) yang ditemukan di lingkungan bawah air. Benda-benda tersebut dapat ditemukan di bawah air tawar maupun air laut, baik yang dapat terlihat di dasar laut maupun yang masih terbenam di bawahnya. Situs arkeologi bawah air dapat mencakup berbagai peninggalan, misalnya kapal, perahu dan kendaraan air lain, termasuk pesawat terbang yang tenggelam dan terkubur di bawah air, juga bangunan-bangunan yang terbenam seluruhnya ataupun sebagian, begitu pula dengan sisa-sisa aktivitas manusia yang asalnya dari darat tetapi kemudian tenggelam sebagai akibat proses pasang surut air laut atau proses abrasi (Rahardjo: 2011).
 2. Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 85 tentang Pemanfaatan Cagar Budaya (1) yang berbunyi Pemerintah, Pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (3) yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

sirkulasi arus global yang dikenal dengan Selain itu bila dilihat dari perspektif sejarah, kawasan perairan ini memang memiliki peranan besar dalam sejarah kebaharian Indonesia³. Oleh karena itu tulisan ini menitik beratkan pada Selat Makassar dan implikasinya dalam konteks kebaharian di Nusantara beserta entitas warisan budaya bawah air yang dikandungnya. *Selat Makassar* adalah sebuah toponim berupa bentangan perairan yang memisahkan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, serta menghubungkan laut Jawa di bagian selatan dengan laut Sulawesi di bagian utara. Selat Makassar menghubungkan dua system Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sehingga Selat Makassar menjadi lintasan arus dari kedua samudera ini yang merupakan Indonesian throughflow atau ARLINDO (Arus Lintas Indonesia), selain itu posisi geografis Selat Makassar menjadikannya jembatan laut antara benua Asia dan benua Australia. Topografi Selat Makassar terdiri dari perairan dalam dan perairan dangkal, perairan dalam dapat mencapai kedalaman hingga >2000 m yang biasanya berada di dekat daratan Pulau Sulawesi, sementara perairan dangkal kedalamannya berkisar >200 m biasanya berada di dekat Pulau Kalimantan (Nurjaya; 2009).



Sumber; [html//selat makassar](http://selatmakassar)

3. Menurut kamus umum istilah bahari berarti purbakala, dan berarti kelautan. Adrian B. Lopian menggunakan kata *bahari* untuk menyebut kelautan dari konteks masa sejarah (Lopian; 2009).

Selain itu pada sebagian besar wilayah perairan ini banyak dijumpai gugusan pulau-pulau dan gusung/taka, termasuk di dalamnya gugusan pulau-pulau Spermonde⁴, paparan Spermonde (Spermonde shelf) terletak di bagian selatan Selat Makassar terdiri atas ± 121 pulau, tepatnya di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, sebaran pulau karang yang terdapat di kepulauan Spermonde terbentang dari utara ke selatan⁵.

Menurut Nurjaya transfort massa air Selat Makassar sepanjang tahun selalu mengarah ke selatan dengan intensitas volume yang bervariasi akibat dari perbedaan tinggi paras laut. Sementara itu angin yang berhembus di perairan Selat Makassar terutama adalah angin *Muson*, yang dalam setahun terjadi pembalikan arah, yang dikenal dengan angin muson barat dan angin muson timur⁶, perubahan arah dan pergerakan angin muson berhubungan erat dengan terjadinya perbedaan tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah di atas benua Asia dan benua Australia. Angin muson barat bertiup antara bulan Desember hingga Februari sedangkan angin muson timur bertiup pada bulan Juni hingga Agustus, sirkulasi kedua angin ini ternyata begitu mantap dan tetap di atas perairan Selat Makasar. Faktor-faktor tersebutlah yang dominan membentuk dan mempengaruhi karakter perairan Selat Makassar. Berdasarkan karakter perairan dan posisi geografisnya Selat Makassar relatif aman menjadi jalur lalu lintas pelayaran. Laut Selat Makassar meliputi wilayah Pesisir barat Sulawesi Selatan, Barat dan Tengah serta pesisir timur Kalimantan Utara, Timur dan Selatan.

-
4. *Spermonde* adalah nama yang diberikan oleh Van Vuuren, seorang peneliti berkebangsaan Belanda pada tahun 1920. *Spermonde* berasal dari istilah bahasa Belanda yang berarti *Sperma*, dinamakan *Spermonde* karena jika dilihat dari atas, gugusan kepulauan ini menyerupai sperma yang menyebar.
 5. Hoeksema (1990) membagi *Spermonde* ke dalam 3 zona yaitu 1; zona terdalam, lebih banyak dipengaruhi oleh daratan dari pantai Makassar. 2; berjarak 5 km dari pantai Makassar, terdiri banyak pulau dengan kedalaman berkisar 30 m. 3; berjarak 12,5 dari garis pantai dengan kedalaman bervariasi antara 30-50 m, pada zona ini banyak dijumpai taka/gusung (Anonim; 2013).
 6. 'Muson' berasal dari bahasa Arab (mosem) yang berarti Musim, sedangkan orang yang pertama menggunakannya adalah pelaut Yunani bernama Hipallus, sehingga nama kuno untuk angin jenis ini adalah *Hipallus* (Wikipedia/html).

Pembahasan

Selat Makassar bukanlah satu-satunya kawasan perairan di Indonesia bahkan di dunia yang menjadi situs bangkai kapal karam (The ship wreck site), akan tetapi bila berbicara tentang potensi Cagar Budaya Bawah Air di Wilayah kerja BPCB Makassar, kawasan ini menjadi salah satu point penting dan perlu diperhitungkan, hal ini disebabkan oleh karena latar belakangnya, yaitu memiliki peran yang cukup signifikan dalam dinamika sejarah kemaritiman bangsa Indonesia, hal mana dapat dibuktikan secara arkeologis.

Indonesia, sebagai negara maritim, dimana wilayah lautnya lebih dominan dibandingkan wilayah daratan, yaitu 75% lautan dan 25% daratan (Nugroho; 2011), sehingga kental dengan karakter kemaritiman, laut berfungsi sebagai media penghubung pulau-pulau, media pemenuhan kebutuhan hidup, serta media bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai aspek kebudayaan. Secara umum Nusantara memiliki peranan penting dalam dunia kemaritiman dalam skala internasional, selain karena daya tarik Nusantara yang kaya akan sumber daya alam, posisinya yang strategis yaitu berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) menjadikan lautan Nusantara senantiasa ramai oleh aktifitas pelayaran, baik pelayaran domestik maupun internasional. Salah satu jalur pelayaran di Nusantara adalah kawasan perairan Selat Makassar, seperti dikemukakan sebelumnya selat ini menghubungkan laut Sulawesi dan laut Jawa, sehingga menjadi jalur bagi pelayaran dari dan menuju ke dua perairan tersebut bahkan merupakan jalur alternatif bagi pelayaran internasional, yaitu dari dan menuju kawasan Asia timur.

Menurut berbagai sumber, sejarah bahari Selat Makassar khususnya pemanfaatannya sebagai jalur lalu lintas pelayaran terhitung sudah dimulai sejak masa prasejarah. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, diperkirakan bahwa sejak 2000 tahun sebelum masehi terdapat suku bangsa lain yang memasuki wilayah Indonesia khususnya Sulawesi, dan kedatangan mereka tidak bisa dipastikan melalui laut. Selain suku bangsa asli pribumi, para ahli mengasumsikan bahwa nenek moyang Indonesia juga diperkirakan berasal dari rumpun Austronesia. Terdapat beberapa teori tentang asal-usul rumpun Austronesia ini, seperti teori *Out of Taiwan* (Belwood-Blust), *The Express to Polynesia* (Diamond), *The Taiwan Homeland Concept* (Reed), *Island South East Asia Origin* (Solheim), *From South Amerika Via Kon Tiki* (Heyerdhal), *An Entangled Bank* (Terrel), *The Geneflow Model* (Devlin), *The Genetic Bottleneck*

in Polynesia (Flint), *The Eden in The East Concept* (Oppenheimer), *Voyaging Corridor Tripple One Account (Green)*⁷ (Chambers 2006, Pietrusewsky; 2006 dalam Noerwidi; 2012 dalam Andriany; 2013), yang kesemuanya menunjukkan bahwa bangsa penjelajah tersebut berasal dari luar Nusantara. Mereka menerapkan strategi *leap proging proses* (yaitu berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya yang lebih dekat, demikian seterusnya hingga mereka sampai ke pulau terjauh, dan mencari jalur pelayaran yang terlindung dari badai dan lebih aman hingga membentuk koridor pelayaran (*voyaging corridor*)). Walaupun tidak ditemukan jejak kehadiran diaspora Austronesia di perairan Selat Makassar, akan tetapi terdapat banyak bukti arkeologis yang mengindikasikan bahwa di beberapa tempat di pulau Sulawesi khususnya di bagian barat daya dahulunya diokupasi oleh koloni-koloni rumpun Austronesia, seperti misalnya daerah (yang saat ini dikenal) Mamuju, Maros-Pangkep, Poso, dsb, yang kemudian menyebar ke daerah lainnya. Salah satu bukti keterkaitan erat antara Selat Makassar dengan Austronesia adalah adanya temuan arkeologi berupa lukisan dinding gua (*Rock Art Painting*) berupa gambar perahu yang ditemukan di gua Bulu Sippong Kabupaten Pangkep⁸.

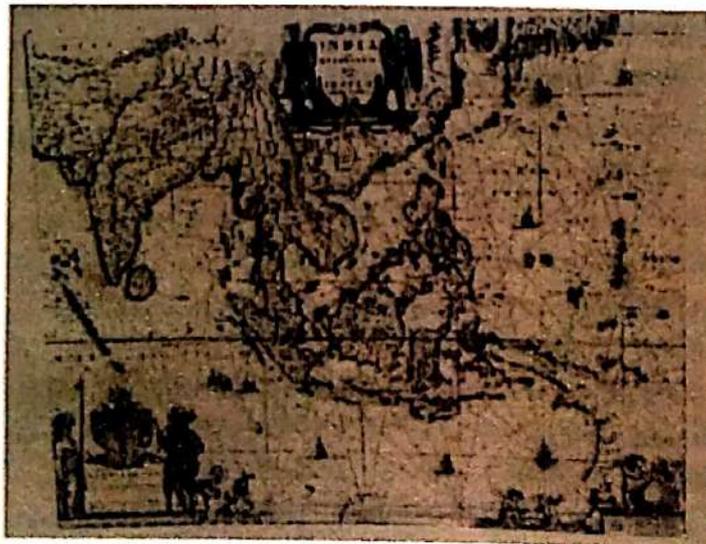
Kemudian pada masa ± 500-1700 Masehi, ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara khususnya kerajaan-kerajaan yang berbasis maritim mulai tumbuh dan berkembang, kerajaan-kerajaan yang berkedudukan di daerah pesisir beberapa diantaranya mampu membina kekuatan laut dan mengembangkan kebudayaan bahari sehingga dapat menguasai wilayah maritim, masing-masing kerajaan berusaha memajukan kerajaannya dengan berbagai strategi, salah satunya dengan menjalin hubungan kerja sama dengan wilayah lain. Menurut prapanca, seratus negara di nusantara sudah memiliki pelabuhan sehingga saling terhubung dan terintegrasi. Kegiatan pelayaran antara pulau-pulau di Nusantara (Interinsuler), dan kegiatan pelayaran dengan dunia luar (internasional). Interaksi antar kerajaan pada masa itu, terutama bagi kerajaan-kerajaan yang berada di pulau yang berbeda tentu saja memanfaatkan media laut. Menurut sumber dari beberapa catatan Cina hubungan antar kerajaan pada masa itu umumnya bermotif niaga, politik serta penyebaran agama.

7. Berdasarkan beberapa teori yang berkembang tersebut, pada intinya terdapat tiga kubu model rekonstruksi persebaran masyarakat penutur bahasa Austronesia yang berbeda, yaitu; (1) Austronesia berasal dari Pulau Taiwan, (2) Austronesia berasal dari kawasan Asia Tenggara Kepulauan dan (3) Austronesia berasal dari kawasan Melanesia.

8. Peter Belwood dalam bukunya *Out of Taiwan* menyatakan bahwa data arkeologis menunjukkan kehidupan Austronesia di Indonesia diawali dengan penghunian gua (Simanjuntak; dalam Andriany; 2013)

Aktivitas pelayaran pada masa-masa ini didorong oleh keinginan masing-masing wilayah untuk pemenuhan kebutuhan, sehingga komoditas yang tidak dapat diperoleh di wilayah setempat akan dicari ditempat lain untuk kemudian saling dipertukarkan. Menurut sebuah kitab yang dibuat oleh seorang Yunani bernama Geographike Hypothesis dan Periplus of the Erythraean Sea⁹ tentang peta dan kumpulan keterangan mengenai pelayaran di Erhytras (Samudera Hindia), begitu pula dalam buku yang ditulis oleh Wolters *Early Indonesian Commerce*, Indonesia telah masuk ke dalam jaringan perdagangan internasional pada awal-awal abad permulaan Masehi, hal ini juga diperkuat dengan catatan-catatan keagamaan dari India dan sumber-sumber dari Cina (Anonim; 1990). Berdasarkan catatan-catatan sejarah pada awal abad 16 perairan Indonesia (dan asia tenggara pada umumnya) diperoleh informasi bahwa kapal-kapal yang melayari laut Nusantara bukan hanya dari Asia tetapi juga dari Eropa, yang pertama muncul adalah kapal-kapal portugis, kemudian disusul dengan Spanyol, Inggris, Perancis dan Belanda. Kunjungan kapal-kapal ini membawa perubahan yang fundamental bagi kondisi kerajaan setempat baik di bidang politik ekonomi maupun di bidang sosial budaya.

Pada umumnya para pedagang mengejar hasil bumi endemik daerah tropis, seperti rempah-rempah dan sebagainya, serta berbagai macam produksi kelautan, yang dipertukarkan dengan komoditas dari masing-masing negara tersebut, seperti misalnya tekstil, keramik dari negara Cina, obat-obatan, parfum, perhiasan berbahan gelas, serta batu mulia dari Asia barat.



Salah satu peta kuno Asia Tenggara karya Willem Bleau (1635). (Nugroho 2011)

Peranan perairan Selat Makassar yang paling dominan pada saat itu salah satunya adalah keterkaitannya dalam sejarah hubungan kerajaan Gowa dengan kerajaan-kerajaan lain¹⁰. Kerajaan Gowa yang berada di pesisir pantai Selat Makassar sejak awal pertumbuhannya sudah menunjukkan perannya sebagai kota pelabuhan yang penting dan patut diperhitungkan dalam perdagangan dunia. Hal ini dibuktikan dari sumber-sumber sejarah antara lain, dalam tulisannya 'Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut' (2009) Lopian mengungkapkan tentang hegemoni Makassar (Goa-Tallo) pada abad XVII sangat luas hingga mencakup jazirah Sulawesi Utara. Selain itu sumber sejarah lainnya mengatakan bahwa 'Tome Pires menganjurkan kepada Portugis agar supaya menggunakan jalan yang lain yakni melalui Kalimantan Selatan dan Makassar untuk menghindari pelabuhan-pelabuhan dan pembayaran pajak di pesisir Jawa'.

Sementara itu menurut Anthony Reid (1999) kedudukan pelabuhan sangat penting dalam perdagangan maritim di Asia Tenggara pada saat itu, oleh karena itu peranan Selat Makassar pun tidak bisa dipisahkan dalam hal tersebut, apalagi ketika Kenneth R Hall membagi lima zona perdagangan dunia yang mempengaruhi dinamika pelayaran dunia pada masa itu, Selat Makassar menjadi penghubung antara *zona perdagangan maritim laut Cina Selatan*, *zona perdagangan maritim laut Sulu*, dengan *zona perdagangan maritim laut Jawa*¹¹ (Anonim; 2014).

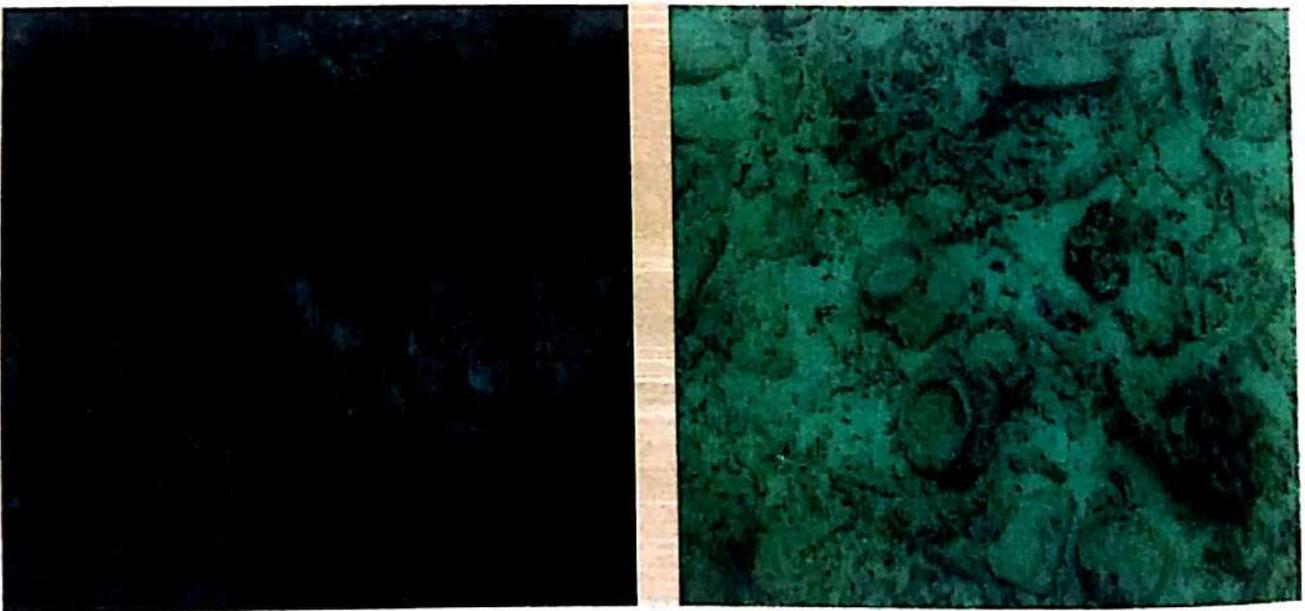
Pada masa itu, perahu atau kapal adalah alat penghubung, Sejarah melayu dan hikayat Banjar mencatat jenis perahu yang berbeda-beda di Nusantara, di Pulau Jawa misalnya dikenal perahu dengan model *jung*, di Pulau Sumatera dan Kalimantan dikenal perahu jenis *ghali/galeon*, sedangkan di Sulawesi dikenal dengan perahu *lambo atau pinisi* dan dari Ternate sejenis *kora kora*, adapula jenis perahu yang disebut *malambang* yang biasa digunakan di Jawa dan Kalimantan (ibid). Pada umumnya perahu-perahu/kapal-kapal tersebut adalah kapal layar yang terbuat dari kayu.

9. Peta yang dibuat oleh Claudius Ptolomeus

10. Hasil identifikasi wilayah Kalimantan pada masa itu sangat sedikit karena menurut catatan dinasti Cina hanya meliputi Brunai, Sulu, Banjarmasin, Puni, dan Karimata.

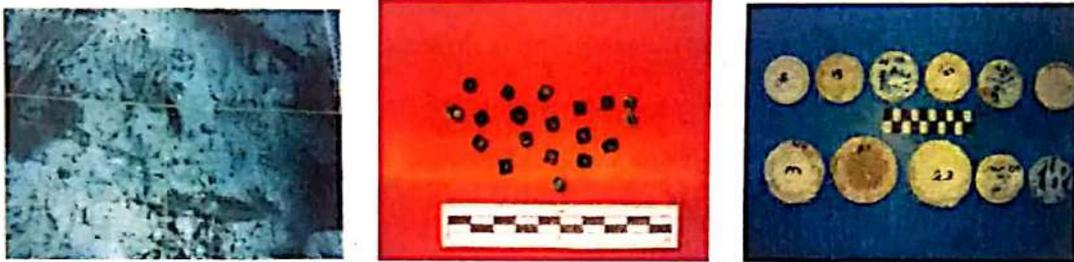
11. Lima zona perdagangan Maritim Asia yang dibuat oleh Kenneth R Hall adalah (1) zona Teluk Bengal (meliputi pesisir Koromandel, India bagian selatan, Srilanka, Burma, bagian utara Semenanjung Malaka, pantai utara dan barat Sumatera), (2) Zona Selat Malaka, (3) Zona Laut Cina Selatan (meliputi pantai timur laut Semenanjung Malaka, teluk Thailand), (4) Zona Laut Sulu (meliputi pantai barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao dan pantai utara Kalimantan, Sulawesi bagian Utara), dan (5) Zona Laut Jawa (meliputi Nusa Tenggara, Maluku, Timor, pantai barat Kalimantan, Jawa, Sumatera bagian selatan dan Sulawesi).

Hingga saat ini kapal-kapal kayu dari masa-masa tersebut diatas yang tenggelam di laut tidak pernah ditemukan utuh, akan tetapi di beberapa titik ship wreck site yang telah ditemukan di Selat Makassar, diidentifikasi sebagai situs dari abad 16-17. Hal ini diasumsikan berdasarkan temuan yang saling berasosiasi pada situs-situs tersebut. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, situs-situs arkeologi bawah air ini mengandung komoditas dagang yang umum pada saat itu yang tentu saja bersifat resistence pada pelapukan akibat air laut. Situs-situs yang telah teridentifikasi tersebut adalah shipwreck site *Gusung Tuara* yang masuk kedalam wilayah administrasi kecamatan Tuppa Biring, kabupaten Pangkajene Kepulauan. Situs ini berada disebuah gusung atau oleh nelayan setempat disebut sebagai *taka* yang termasuk kedalam gugusan pulau-pulau Spermonde, dimana pada situs tersebut ditemukan sebaran keramik dalam jumlah besar dalam berbagai ukuran dan berbagai jenis yang berdasarkan ciri-ciri fisiknya diasumsikan sebagai keramik dari masa Dinasti Ming di China, selain keramik temuan di situs ini berasosiasi dengan batu bata yang secara fisik berbeda dengan batu bata yang dibuat saat ini, batu bata ini umumnya berukuran lebar dan berbentuk pipih. Sebaran artefak-artefak ini diperkirakan berasal dari kapal yang berbahan kayu, karena selain temuan tersebut terdapat pula potongan balok kayu yang sebagian besarnya telah mengalami kelapukan, selain balok tersebut ditemukan pula susunan papan yang berbentuk segi empat.



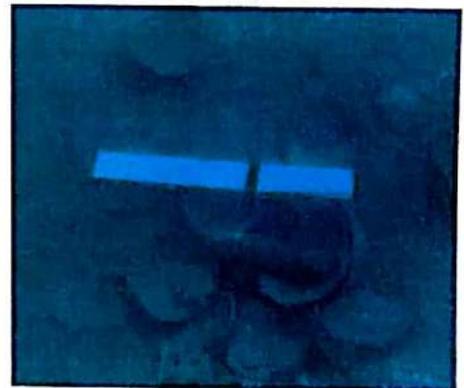
Potensi peninggalan arkeologi bawah air di ship wreck site Gusung Tuara

Adapula ship wreck site Taka Bulango yang juga teridentifikasi sebagai situs dari abad XVI-XVII. Situs ini berada di gusung bernama Taka Bulango yang juga masuk kedalam wilayah administratif kecamatan Tupabiring, kabupaten Pangkajene Kepulauan. Adapun kandungan arkeologis pada ship wreck site ini berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar berdasarkan ciri-ciri fisiknya adalah keramik China dari Dinasti Ming dan Ching dalam berbagai bentuk dan ukuran, selain itu ditemukan pula manik-manik berbagai warna dalam jumlah yang banyak, adapula tiang/balok berbentuk persegi panjang berbahan batu granit (dewasa ini balok tersebut telah musnah akibat aktifitas pengeboman ikan). Di situs ini juga ditemukan struktur balok-balok dan papan-papan yang diindikasikan sebagai bangkai kapal.



Temuan di ship wreck site Taka Bulango
(Laporan Survey Situs Bawah Air Di Situs Taka Bulango)

Selain kedua ship wreck site tersebut diatas yang terletak di kabupaten Pangkajene Kepulauan, adapula situs-situs yang sudah didokumentasikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, yaitu di wilayah administratif kabupaten Selayar tepatnya di situs bawah air Tile-Tile, dengan potensi arkeologi bawah air berupa keramik dan koin yang berdasarkan identifikasi ciri-ciri fisiknya diperkirakan berasal dari China pada era Dinasti Tang, sayangnya hingga saat ini belum berhasil ditemukan adanya indikasi bangkai kapal di situs bawah air ini.



Selain ship wreck site jenis kapal kayu, ditemukan pula ship wreck site berjenis kapal besi, hal ini dilatar belakangi oleh sejarah kolonialisme di Nusantara. Dimulai pada sekitar abad XIX ketika Belanda mengadakan ekspansi berskala besar di Nusantara. Selain berniaga, dan penyebaran agama (kristenisasi), Belanda pun memotorisasi armada perang untuk memperkuat



Tinggalan arkeologis pada ship wreck site Taka Kappala
(laporan Survey Situs Bawah Air Situs Taka kappala 2007)

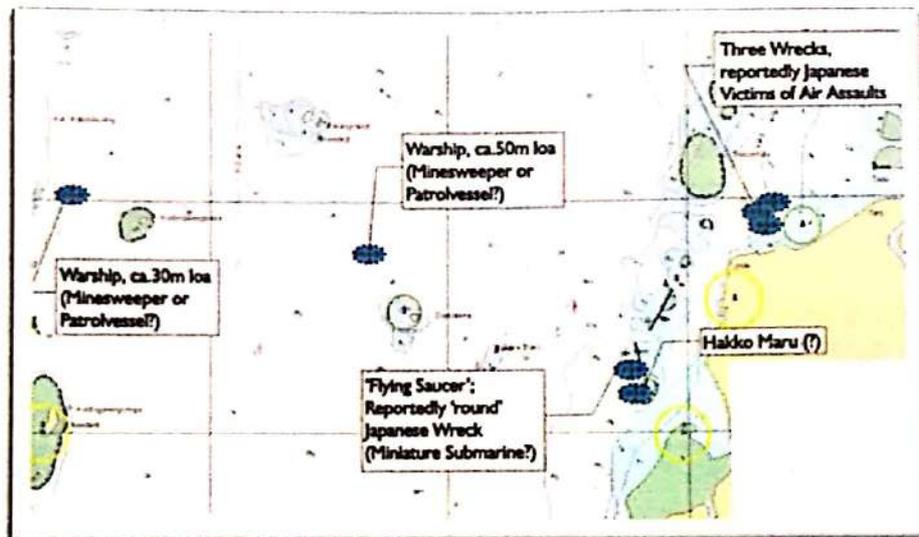
Selain ship wreck site Taka Kappala, kuburan bangkai kapal uap juga ditemukan di perairan pantai Rangas, kabupaten Majenne Provinsi Sulawesi Barat. Posisi kapal pada saat ditemukan berada di tubir (batas antara perairan dangkal dengan perairan dalam tak jauh dari pesisir pantai kampung Rangas. Sebahagian dari tabung mesin kapal ini berada diatas permukaan air, sehingga situs ini dapat dikenali dari jauh/ dapat terlihat dari pantai sehingga masyarakat setempat menjadikan bangkai kapal ini sebagai penanda.



Bangkai kapal karam di situs Bawah Air Majenne
(Laporan survey situs Bawah Air di Kabupaten Majenne)

Pada umumnya ship wreck site dari jenis kapal uap (*steam boat*) dapat diketahui dari feature bangkai kapal, yaitu adanya seperangkat alat yang berfungsi untuk menghasilkan uap, dimana uap tersebutlah yang akan menggerakkan propeller untuk mendorong kapal, perangkat yang paling mudah dikenali pada situs kapal karam adalah adanya tungku uap/ketel, (atau bila beruntung) beserta batu bara sebagai bahan baku pembakaran. Kapal-kapal uap pada masa itu selain digunakan untuk memperlancarkan aktifitas dagang, juga digunakan dalam rangka *pasifikasi* (pengamanan wilayah kekuasaan) bahkan digunakan untuk peperangan.

Selain bangkai kapal yang memuat komoditas dagang, Selat Makassar juga kaya akan potensi arkeologis dari jenis kapal-kapal dan pesawat-pesawat perang. Umumnya situs-situs yang telah dieksplorasi adalah bangkai kapal yang berasal dari negara Jepang. Bahkan menurut Agus Sudaryadi dalam tulisannya *'Lokasi Tenggelamnya Kapal Jepang Pada perang Dunia II di Perairan Indonesia'* (2008), bahwa kebanyakan kapal-kapal Jepang karam di wilayah timur Indonesia khususnya di perairan Selat Makassar.



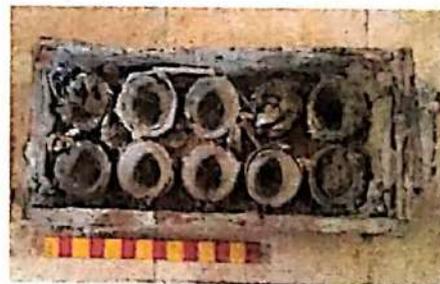
Peta posisi ship wreck site kapal-kapal Jepang di Indonesia
(courtesy; Agus Sudaryadi)

Hal ini disebabkan karena fase tahun 1942 selat Makassar merupakan salah satu arena pertempuran dahsyat, selain antara penjajah dengan pribumi, juga antara pasukan sekutu (ABDACOM/ American-Britain-Dutch-Australian Command) dengan pasukan Jepang pada perang dunia II khususnya area Asia Pasifik¹⁴. Selat Makassar merupakan salah satu jalur masuknya invasi pasukan Jepang ke Indonesia (Jalur masuk tentara Jepang ke Indonesia; selat Karimata dari arah barat, selat Makassar dari arah tengah dan perairan Maluku dari arah timur) ,

-
14. Hal ini terkait dengan kepentingan Jepang terhadap lokasi-lokasi strategis khususnya sumur-sumur minyak di Tarakan dan Balikpapan dan sumur nikel di Kolaka , dan markas Jepang di Morotai.
15. Armada laut Jepang termasuk didalamnya adalah kapal laut dan pesawat tempur. Kuburan pesawat tempur (aircraft) juga dapat ditemukan di perairan Makassar. Sejauh ini baru satu buah situs yang telah diketahui titiknya oleh BPCB Makassar.

selain itu posisi selat Makassar juga menjadi penting artinya bagi pasukan sekutu dalam mempertahankan wilayah Tarakan dan Balikpapan yang memiliki lapangan terbang dan 700 sumur dan kilang minyak. Berdasarkan catatan sejarah gelombang serangan pertama Jepang ke Nusantara adalah ke Tarakan yang dilanjutkan dengan pendaratan pasukan Jepang di Manado, Makassar, Timor dan Bali dibawah pimpinan laksamana muda Raizo Tanaka. Pada saat itu tak kurang dari 20 armada laut Jepang yang tenggelam di perairan Selat Makassar (Sudaryadi; 2008).

Berdasarkan data kelompok kerja Pengendalian peninggalan Bawah Air BPCB Makassar, ship wreck site kapal perang yang telah terdokumentasi adalah bangkai kapal di perairan Kodingareng Keke yang ditemukan pada kedalaman 50 meter, yang posisinya secara administratif masuk ke dalam wilayah kota Makassar, berjarak sekitar 13,48 km dari pesisir pantai Makassar, indikasi yang membuktikan bahwa kapal ini adalah kapal perang Jepang adalah adanya temuan lempengan kuningan bertuliskan kanji kuno dari bangkai kapal ini, selain itu ditemukan pula kotak kayu yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru (Anonim ; 2013)



Temuan koin dan kotak mesiu di shipwreck Kodingareng Keke
(courtesy pribadi)

Ship wreck kapal perang Jepang juga diketemukan di perairan Samalona, yang berlokasi di perairan pulau Samalona, berjarak sekitar 6,8 m dari garis pantai. Makassar sehingga perairan ini masuk kedalam wilayah administratif kota Makassar. Bangkai kapal dapat dijumpai pada kedalaman 42 m. Situs ini bahkan telah diziarahi oleh cucu dari salah satu penumpang kapal naas tersebut.

Untuk mengetahui kapan tepatnya kapal-kapal (seperti yang telah disebutkan satu persatu diatas) karam, beserta dari mana dan akan kemana kapal-kapal tersebut, perlu upaya eksplorasi yang lebih mendalam. Sangat disayangkan ship wreck site tersebut senantiasa mengalami kerusakan, baik itu pengambilan muatan dan bagian badan kapal, maupun oleh

aktifitas penangkapan ikan, apakah berupa penggunaan jala/pukat harimau, maupun penggunaan bom. Pada umumnya ship wreck tersebut mengalami nasib yang sama. Contoh kasus misalnya adalah situs Bawah Air Taka Bulango, yang ketika disurvei pertama kalinya pada tahun 2001, masih dapat ditemukan balok batu granit dan keramik dalam ukuran yang utuh, namun pada survey tahun 2010, balok-balok tersebut telah hancur dalam kepingan-kepingan kecil, bahkan pada survey tahun 2012 artefak-artefak keramik yang ada di ship wreck site tersebut semakin menyusut. Begitu pula dengan bangkai kapal-kapal berbahan besi-baja, tak luput dari aksi pencari besi tua. Sebagian besar hilangnya bagian-bagian struktur kapal disebabkan oleh tangan yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan pula hilangnya data konteks historisnya.

Ship wreck site ini adalah saksi perjalanan sejarah sejak berabad-abad yang lalu, hanya dengan mempelajarinya kita bisa mengungkap kekayaan peradaban manusia masa lalu, oleh karena itu sudah sepatutnya kita memberi perhatian lebih terhadap keberadaannya. Dengan tulisan ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat tentang kekayaan laut khususnya sumber daya budaya yang pantas dibanggakan, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan, agar nantinya dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andriany. 2013. Ciri Budaya Austronesia di Semenanjung Barat Daya Sulawesi Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar 1913-2013 Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya. Bunga Rampai
2. Anonim. Undang undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar Budaya
3. Anonim. Undang undang Dasar 1945
4. Anonim. 1990. Sejarah Pelayaran Niaga di Indonesia. Jilid I. (Prasejarah Hingga 17 Agustus 1945)
5. Anonim. 2007. Laporan Survey Cagar Budaya bawah Air di Perairan Taka kappala kabupaten Barru. Pokja Pengendalian Peninggalan Bawah Air. BPCB Makassar
6. Anonim. 2010. Laporan Survey Cagar Budaya bawah Air di Perairan Tile tile Kabupaten Selayar. Pokja Pengendalian Peninggalan Bawah Air. BPCB Makassar
7. Anonim. 2010. Laporan Survey Cagar Budaya bawah Air di Perairan Taka Bulango kabupaten Barru. Pokja Pengendalian Peninggalan Bawah Air. BPCB Makassar
8. Anonim. 2013. Laporan Survey Cagar Budaya bawah Air di Perairan Kodingareng Keke. Pokja Pengendalian Peninggalan Bawah Air. BPCB Makassar
9. Anonim. 2014. Sejarah Maritim Dunia. Indonesia Sebagai Negara Maritim.
10. Lopian, Adrian B. Orang laut Bajak Laut Raja Laut. Sejarah kawasan laut Sulawesi Abad XIX. 2009
11. Nugroho, Irawan Djoko, *Majapahit: Peradaban Maritim*. 2011
12. Nurjaya. I Wayan dan Heron Surbakti. 2009. Studi Pendahuluan kondisi Oseanografik Fisik Pada Musim Barat di Perairan Pantai Timur Antara Balikpapan Dan Delta Mahakam. Jurnal Kelautan Nasional. Vol.1 Edisi Khusus Januari
13. Rahardjo, Supratikno dan Professor Hamdi Muluk. Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia
14. Selat Makassar. Html//blog spot
15. Sudaryadi, Agus. 2008. Lokasi Tenggelamnya Kapal Jepang Pada Perang Dunia II Di Perairan Indonesia. Relik 06

IMPLEMENTASI PERDA CAGAR BUDAYA KOTA PALOPO DI ERA OTONOMI DAERAH¹

Oleh. Yadi Mulyadi²

1. Pendahuluan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, salah satu hal yang menjadi acuan adalah peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi sampai pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota. Peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah pada hakekatnya ditujukan untuk mengatur serta menjamin jalannya sistem pemerintahan dengan baik. Dalam hal ini juga menyangkut hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga Negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah, termasuk juga Pemerintah Kota Palopo, memiliki peraturan daerah yang dibuat berdasarkan hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kajian ilmiah dalam rangka penyusunan peraturan daerah inilah yang dalam bahasa hukum disebut naskah akademik.

Terkait dengan naskah akademik peraturan perundang-undangan ini, secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana pada pasal 1 ayat 11 tercantum pengertian mengenai naskah akademik yaitu,

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pengertian tersebut semakin mempertegas pentingnya sebuah naskah akademik dalam proses penyusunan peraturan daerah. Demikian pula dalam penyusunan peraturan daerah tentang Cagar

¹ Telah dipresentasikan dalam kegiatan Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo pada tanggal 4 Maret 2015 di Kota Palopo

² Staf Pengajar Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komda Indonesia Timur. Dapat dihubungi melalui email di arkeologsunda@hotmail.com

Budaya di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan naskah akademik sebagai acuan pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut. Dalam hal ini kita patut berbangga karena Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan Perda tentang Cagar Budaya melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo. Sampai saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan, baru beberapa daerah yang telah memiliki Perda Cagar Budaya yaitu, Kabupaten Bulukumba, Wajo, Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Beberapa daerah lainnya, salah satunya Kabupaten Maros sementara melakukan kajian naskah akademik terkait Ranperda Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Cagar Budaya yang telah ditetapkan pada tanggal 5 September 2014 oleh Pemerintah Kota Palopo merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan Pemerintah Kota Palopo dalam pelestarian Cagar Budaya, sekaligus respon positif terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam paradigma pelestarian Cagar Budaya dewasa ini, nilai Cagar Budaya tidak hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan tetapi juga merupakan bagian dari pembentuk jati diri bangsa, kebanggaan nasional, ketahanan budaya, persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam undang-undang ini, secara tegas pemerintah daerah serta masyarakat diberikan kewenangan untuk turut terlibat dalam upaya pelestarian Cagar Budaya. Untuk itu perlu dilakukan usaha yang bertujuan untuk memahami landasan hukum keberadaan Cagar Budaya serta kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam pelestarian Cagar Budaya, sehingga pemanfaatan Cagar Budaya sebagai obyek wisata tetap dalam koridor prinsip-prinsip pelestarian. Dalam kajian *Cultural Resource Management* salah satu aspek dalam pengelolaan adalah aspek legalitas. Oleh karena itu, produk hukum baik yang berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah harus selalu menjadi acuan dalam pengelolaan Cagar Budaya.

Perubahan sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat radikal dalam sistem pemerintahan termasuk di dalamnya perundang-undangan yang mengatur pelestarian benda Cagar Budaya. Perubahan tersebut menempatkan peran pemerintah yang semula merupakan operator tunggal selanjutnya menjadi fasilitator, dinamisator, dan koordinator. Hal ini memberi peluang kepada masyarakat untuk

lebih berperan-serta dalam upaya pelestarian Cagar Budaya. Tuntutan perubahan yang berkembang dalam masyarakat mengenai pentingnya pengaturan pelestarian Cagar Budaya itulah yang mendorong diperlukannya peraturan daerah yang terkait dengan hal itu. Terlebih di Kota Palopo kaya dengan potensi Cagar Budaya, sehingga keberadaan peraturan daerah mengenai hal ini menjadi hal yang penting.

Tabel 1. Daftar Cagar Budayadi Kota Palopo (BPCB Makassar, 2014)

No		Nama Cagar Budaya	Kelurahan	Kecamatan	Letak Astronomis
No Urut	No. Inv				
1	137	Istana Datu Luwu	Amassangan	Wara	2°59'39.56"S 120°11'45.72"T
2	136	Masjid Kuno Palopo (Masjid Jami Tua Palopo)	Batupasi	Wara Utara	2°59'38.80"S 120°11'42.86"T
3	-	Kantor Pos dan Giro	Batupasi	Wara Utara	2°59'37.46"S 120°11'44.65"T
4	-	Tana Bangkala (a. Salekkoe, b. Pancal c. Mattirowalie)	Topotikka	Wara	a. 3° 0'29.48"S 120°12'6.50" b. 3° 0'37.65"S 120°12'11.41" c. 3° 0'40.06"S 120°12'1.88"
5	-	Rujab Wakil Walikota Palopo (Rujab Ketua DPRD)	Amassangan	Wara	2°59'41.11"S 120°11'40.89"T
6	-	Kantor Kodim	Amassangan	Wara	2°59'42.94"S 120°11'38.79"T
7	-	Kantor Bappeda	Batu Pasi	Wara Utara	2°59'36.39"S 120°11'36.47"T
8	-	Eks Rumah Sakit Sawerigading (kantor Walikota Palopo)	Amassangan	Wara	2°59'45.94"S 120°11'40.59"E
9	-	Kantor LVRI (Sekretariat Kedatuan Luwu dan FKPPi)	Amassangan	Wara	2°59'44.74"S 120°11'42.34"T
10	-	Gereja PNIEL	Boting	Wara	2°59'48.05"S 120°11'37.07"T
11	-	Rumah Jabatan Kasdim	Boting	Wara	2°59'47.18"S 120°11'35.18"T
12	-	Mess Kodim	Boting	Wara	2°59'46.13"S 120°11'34.74"T
13	-	Rumah Jabatan Komandan Kodim	Boting	Wara	2°59'45.14"S 120°11'34.34"T
14	-	Kantor PM	Batu Pasi	Wara Utara	2°59'41.19"S 120°11'36.60"E
15	-	Rumah Tinggal (Pak Sabani)	Batu Pasi	Wara Utara	2°59'36.98"S 120°11'35.89"E
16	-	Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Amassangan	Wara	2°59'45.47"S 120°11'38.86"E
17	-	Kantor Eks Bea dan Cukai (PT. EMKL)	Pontap	Wara timur	2°59'15.31"S 120°12'2.25"T
18	145	Kompleks Makam Andi Tadda dan makam tua	Amassangan	Wara	2°59'48.79" S 120°11'44.49"T
19	-	Kompleks Makam Tompotikka (Jera Surutanga)	Surutanga	Wara timur	0'7.22"S 120°12'5.91"T
20	-	Kompleks Makam Puak To Luwu (Saokutarae)	Salekoe	Wara timur	3° 0'22.35"S 120°12'8.16"T
21	-	Kompleks Makam Lokkoe	Sabbamparu	Wara utara	2°59'31.88"S 120°11'22.83"E

Mengetahui, mengerti dan memahami landasan hukum serta wewenang dalam pemanfaatan Cagar Budaya perlu menjadi prioritas pemerintah, karena selama ini masih menyisakan beberapa persoalan yang harus secepatnya dicarikan jalan keluar. Misalnya, terkait dengan pengertian tentang Cagar Budaya dalam persepsi berbagai pihak berbeda-beda, sehingga diperlukan penyatuan persepsi terlebih dahulu. Salah satu langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo yaitu dengan membuat peraturan daerah tentang pelestarian Cagar Budaya. Perda ini tentunya dapat mendorong dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Palopo dalam rangka melindungi Cagar Budayanya. Hal ini tentunya perlu kita apresiasi bersama secara nyata dalam bentuk dukungan dan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan Perda tersebut.

2. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah jelas bahwa tinggalan Cagar Budaya di Palopo harus segera dilestarikan dan dilindungi. Oleh karena itu, upaya pengelolaan Cagar Budaya yang berwawasan pelestarian menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Disinilah peran aktif pemerintah diperlukan dalam merumuskan peraturan daerah tentang pelestarian Cagar Budaya. Pemikiran ilmiah mengenai pentingnya peraturan daerah tentang pelestarian Cagar Budaya ini, sejalan dengan landasan filosofis yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan filosofis dan yuridis tertinggi bagi Bangsa Indonesia. Sebagai konstitusi dan sumber hukum tertulis tertinggi, Pasal 32 (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan sebagai berikut :

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

Amanat undang-undang sebagai landasan filosofis utama dalam pelestarian Cagar Budaya, semakin menegaskan hakekat dari kebudayaan yang dirumuskan para ahli. Kebudayaan merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungannya. Pengertian kebudayaan meliputi peralatan sebagai aspek kebendaan, sedangkan

intinya terdiri atas ide-ide serta nilai-nilai budaya yang merupakan hasil abstraksi pengalaman para pendukungnya yang berikutnya menguasai sikap dan tingkah laku para pendukungnya. Benda budaya sebagai unsur kebudayaan yang bersifat materi mencakup kebudayaan lama dan asli yang di dalamnya termasuk Cagar Budaya sebagai peninggalan masa lalu.

Dalam kerangka yang lebih luas, peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum yang menjadi cerminan daripada suatu sistem sosial. Oleh karena itu, sistem hukum seyogyanya mencerminkan unsur-unsur kebudayaan, kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang, proses-proses sosial maupun perubahan-perubahan sosial. Sistem sosial juga perlu diketahui, agar dapat digali dasar berlakunya hukum.

Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor yaitu faktor-faktor yuridis, filosofis dan sosiologi. Secara yuridis hukum berlaku apabila hukum tadi terbentuk melalui prosedur tertentu dan oleh badan-badan tertentu, misalnya menurut Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara filosofis, suatu hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum dari masyarakat, misalnya masyarakat adil dan makmur. Di dalam arti sosiologis, maka hukum berlaku apabila dipaksakan berlakunya (diterima atau tidak) dan apabila hukum diterima, diakui dan ditaati oleh mereka yang terkena oleh hukum tadi. Selanjutnya hal ini mengakibatkan bahwa tidak jarang terdapat perbedaan-perbedaan antara hukum tertulis yang dianggap sebagai kaidah yang ideal, dengan hukum dalam kenyataan dan pola-pola perikelakuan yang dikendaki oleh masyarakat.

Pada akhirnya tujuan penyusunan naskah ini bermuara pada upaya memberikan gambaran tentang alur pikir dalam memajukan kebudayaan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 32 dan Pasal 33 UUD 1945, dalam rangka pembangunan jati diri bangsa, ketahanan budaya dan kebanggaan nasional di tengah peradaban dunia, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini keberadaan Cagar Budaya masih sangat terancam dengan berbagai macam kepentingan lain, dan hal ini pun terjadi di Palopo. Hadirnya undang-undang tersebut, salah satunya memang ditujukan sebagai upaya nyata pemerintah dalam melestarikan Cagar Budaya, termasuk di dalamnya terkait dengan pengelolaan. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo ini menjadi penting dan perlu untuk diimplementasikan secara optimal.

Implementasi Perda perlu dilakukan secara optimal agar Pemerintah Kota Palopo tidak melakukan kesalahan sebagaimana daerah lain dalam penerapan perdanya. Selama ini, dalam berbagai pemberitaan di media banyak disebutkan Perda yang dikategorikan mandul. Tentunya hal ini kita harapkan tidak terjadi di Kota Palopo. Dalam proses penyusunan Perda ini telah banyak dikeluarkan waktu, pikiran, tenaga dan juga anggaran yang tidak sedikit jumlahnya, jadi tentunya akan menjadi sebuah ironi jika Perda tentang Cagar Budaya ini tidak diimplementasikan dengan baik.

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Perda Cagar Budaya ini, Pemerintah Kota Palopo perlu segera melakukan beberapa hal yang mendukung implementasi Perda ini, salah satunya yang dilakukan saat ini yaitu kegiatan sosialisasi Perda Cagar Budaya. Kegiatan sosialisasi ini merupakan hal yang penting dilakukan agar segenap stakeholder terkait mengetahui hal ihwal mengenai Perda ini, dan tentunya diharapkan peserta sosialisasi akan menyampaikan pengetahuan yang dia miliki dari kegiatan sosialisasi ini kepada masyarakat di sekitarnya, mulai dari keluarga dekatnya. Selain kegiatan sosialisasi, perlu dilakukan pula upaya publikasi yang sistematis dan berkelanjutan. Publikasi ini dapat dilakukan dengan beragam cara dan media, mulai dengan membuat poster dan mendistribusikan Perda Cagar Budaya ini kepada masyarakat. Mengupload dokumen Perda di website resmi Pemerintah Kota Palopo, sehingga masyarakat yang membutuhkannya dapat mengunduh dokumen Perda tersebut dengan mudah. Hal lain yang juga dapat dilakukan yaitu dengan bekerjasama bersama TV Lokal atau media lokal di Palopo dalam mempublikasikan Perda Cagar Budaya tersebut.

Sosialisasi dan publikasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perda ini sehingga menumbuhkan kepatuhan masyarakat untuk tunduk pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam Perda ini. Dengan demikian, Perda ini benar-benar terimplementasikan dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan indikator atau kriteria yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari penerapan Perda Cagar Budaya ini. Indikator atau kriteria yang ditentukan harus dapat terukur dan diverifikasi. Salah satu hal yang dapat menjadi indikator dari keberhasilan penerapan Perda ini misalnya penambahan jumlah warisan budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya; kebermanfaatan Cagar Budaya yang semakin berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan lain-lain. Ketika dalam jangka waktu dua atau tiga tahun terjadi penambahan Cagar Budaya di Kota Palopo maka dapat dikategorikan bahwa Perda ini cukup efektif. Demikian pula ketika masyarakat merasakan

manfaat langsung dari lestarinya Cagar Budaya di Kota Palopo, dapat dikategorikan bahwa Perda Cagar Budaya ini terimplementasikan dengan optimal.

Hal ini tentunya, bukan perkara mudah untuk dilakukan tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Komitmen yang kuat dari pemerintah serta dukungan dari masyarakat akan memudahkan implementasi Perda Cagar Budaya ini. Oleh karena itu, optimalisasi segenap SDM kebudayaan di Kota Palopo perlu dilakukan secara simultan dan berkelanjutan mulai dari level atas sampai di tingkat pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Kota Palopo yang membidangi Cagar Budaya. Misalnya dengan membuka formasi untuk mengisi tenaga di bidang Cagar Budaya, mengikutkan pelatihan pencagarbudayaan untuk SDM yang memenuhi kriteria dan lain-lain.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Perda secara berkesinambungan untuk melihat sejauhmana efektifitas dari Perda, termasuk melakukan revisi terhadap Perda jika berdasarkan hasil kajian dan evaluasi dianggap belum optimal, juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan Perda Cagar Budaya dengan baik. Mengetahui, mengerti dan memahami landasan hukum serta wewenang dalam pemanfaatan Cagar Budaya perlu menjadi prioritas pemerintah, karena selama ini masih menyisakan beberapa persoalan yang harus secepatnya dicarikan jalan keluar. Salah satu langkah kongkrit yang telah ditempuh pemerintah Kota Palopo dengan membuat peraturan daerah tentang Cagar Budaya, dapat mendorong dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam rangka melindungi Cagar Budayanya. Hal tersebut perlu didukung bersama oleh segenap stakeholder yang terkait.

Perda Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini terdiri dari VI Bab dan 48 pasal yang mengatur mulai dari Ketentuan Umum sampai Ketentuan Penutup. Perda telah ditetapkan pada tanggal 5 September 2014. Dengan demikian perda ini telah berlaku efektif dan mengikat seluruh masyarakat Kota Palopo sejak tanggal ditetapkannya. Perda ini mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Palopo dalam hal pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Secara umum, tugas Pemerintah Kota Palopo sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 4 yaitu “melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya”, sedangkan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo diatur secara rinci dalam Pasal 5 yaitu:

- a. Menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya di Kota Palopo;
- b. Menggordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sector dan wilayah;
- c. Menghimpun data Cagar Budaya;
- d. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. Menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;
- g. Melakukan penyelidikan kasus pelanggaran hukum;
- h. Mengelolaa kawasan Cagar Budaya;
- i. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- j. Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- k. Melakukan pengelompokkan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kota;
- l. Menetapkan batas situs dan kawasan;
- m. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Perda ini juga, dalam beberapa pasal tertentu perlu dtindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Walikota; yaitu Peraturan Walikota tentang Pendaftaran benda dan/atau bangunan Cagar Budaya (Pasal 16, ayat (3)); kedua, Peraturan Walikota mengenai Pemanfaatan dan Pengembangan Cagar Budaya (Pasal 28); ketiga, Peraturan Walikota tentang Tata Cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya (Pasal 35, ayat (2)) dan keempat, Peraturan Walikota terkait dengan hal-hal lain yang belum diatur dalam perda ini (Pasal 47).

Fenomena dewasa ini, di berbagai daerah banyak sekali Perda yang mandul alias tidak optimal dalam implementasinya. Hal ini tentunya tidak kita harapkan terjadi terkait dengan penerapan Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan prosedur yang jelas dalam rangka penerapan Perda Cagar Budaya tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Perda tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Walikota yang terkait. Sosialisasi Perda kepada segenap stakeholder yang dilakukan secara berkelanjutan dengan beragam bentuk dan media.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Perda secara berkesinambungan untuk melihat sejauhmana efektifitas dari Perda. Melakukan revisi terhadap Perda jika berdasarkan hasil kajian dan evaluasi dianggap belum optimal.

3. Penutup

Perlu dipahami bahwa pelestarian Cagar Budaya tidak hanya berorientasi masa lampau. Sebaliknya, pelestarian harus berwawasan ke masa kini dan masa depan, karena nilai-nilai penting itu sendiri diperuntukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Dari aspek pemanfaatan Cagar Budaya, tujuan pelestarian dapat diarahkan untuk mencapai nilai manfaat, nilai pilihan, dan nilai keberadaan. Nilai Manfaat, lebih mengutamakan pemanfaatannya pada saat ini, baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jatidiri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pariwisata yang keuntungannya dapat dirasakan oleh generasi saat ini. Nilai pilihan mengasumsikan Cagar Budaya adalah simpanan untuk generasi mendatang, sehingga Cagar Budaya dilestarikan demi generasi mendatang. Karena itu, pilihan pemanfaatannya diserahkan kepada generasi mendatang dan generasi saat ini bertugas menjaga stabilitasnya agar Cagar Budaya tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Nilai keberadaan lebih mengutamakan pelestarian yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya budaya akan dapat bertahan atau tetap ada, walaupun tidak merasakan manfaatnya. Hakikat tujuan pelestarian Cagar Budaya tidak semata-mata untuk melestarikan wujud bendawinya, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai penting yang ada di baliknya, maka untuk menentukan apakah warisan budaya itu wajib dilestarikan atau tidak harus dilakukan kajian nilai penting.

Cagar Budaya sebagai bagian dari kebudayaan merupakan refleksi dari gagasan dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena perilaku manusia pada dasarnya teratur, hasil dari interaksi yang berupa Cagar Budaya baik yang berbentuk artefak maupun situs dan kawasan juga memiliki pola-pola tertentu yang mencerminkan gagasan yang melatarbelakanginya. Oleh karena hasil dari gagasan tersebut dibangun atas dasar pengalaman kesejarahan yang unik dalam rangka menanggapi lingkungannya yang spesifik dan diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, juga mencerminkan nilai-nilai kearifan terhadap lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pelestarian Cagar Budaya adalah wajib

hukumnya bagi kita yang memiliki keanekaragaman budaya dalam sistem pemerintahan negara kesatuan agar tiap-tiap daerah dapat mengenali dan bangga atas budaya yang mereka miliki.

Oleh karena itu, sasaran yang ingin diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Palopo adalah:

- a. Tercapainya pelestarian Cagar Budaya yang mempunyai nilai penting sehingga dapat diketahui, digunakan, dan dilanjutkan keberadaannya untuk kemanfaatan generasi mendatang.
- b. Terumuskannya nilai penting Cagar Budaya yang menjadi rujukan bagi pengambil keputusan dalam mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak bertentangan dengan upaya pelestarian.
- c. Terlindunginya sebagian atau seluruh Cagar Budaya
- d. Terwujudnya pengelolaan Cagar Budaya sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
- e. Terhambatnya kerusakan atau kemerosotan nilai-nilai penting Cagar Budaya.

Keberhasilan implementasi Perda Cagar Budaya harus dapat terukur dengan jelas, oleh karena itu seyogyanya ditentukan indikator keberhasilan dari Perda ini. Misalnya penambahan jumlah warisan budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya; kebermanfaatan Cagar Budaya yang semakin berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan lain-lain.

Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam melaksanakan segenap peraturan yang berlaku dalam Perda, serta dukungan dari semua stakeholder. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Kota Palopo yang membidangi Cagar Budaya. Misalnya dengan membuka formasi untuk mengisi tenaga di bidang Cagar Budaya, mengikutkan pelatihan pencagarbudayaan untuk SDM yang memenuhi kriteria dan lain-lain. Keberhasilan dari implementasi Perda Cagar Budaya di Kota Palopo ini tentunya menjadi harapan kita bersama agar dapat terwujudkan Kota Palopo sebagai Kota Pusaka yang merefleksikan kepedulian kita akan pelestarian Cagar Budaya di Kota Palopo.

4. Daftar rujukan yang direkomendasikan

- Pearson, M. dan S. Sullivan. 1996. *Looking After Heritage Places*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Saunders, A. 1990. Heritage Management and Training in England, dalam Henry F. Cleere (ed.), *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. Unwin Hyman, London.
- Tanudirjo, D.A. 2003. Warisan Budaya Untuk Semua, Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang, makalah disajikan dalam Kongres Kebudayaan di Bukit Tinggi, Oktober 2003.
- Tanudirjo, D.A. 2005 Arkeologi Publik : Antara Dunia Ilmiah Dan Dunia Nyata. Makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Arkeologi, IAAI Komda Jateng – DIY, di Beteng Vredeburg, Juni 2005
- UNESCO. 2005. *Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention*. World Heritage Centre. Document WHC.05/2, 2 February 2005.
- Yadi Mulyadi. "Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Budaya Terpadu dan Kawasan Strategis Konservasi Warisan Budaya di Kota Makassar" dalam Jurnal Lensa Budaya Fakultas Ilmu Budaya Unhas. 2010

POTENSI SUMBER DAYA ARKEOLOGI BAWAH AIR UNTUK PENGEMBANGAN EKOWISATA BAHARI

Oleh : Chunjunarsih

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia dengan luas lautan sebanyak 3.273.810 km² dan 17.508 pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan luas wilayah lautan yang dimiliki, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, disamping itu banyak pula tersimpan tinggalan arkeologi, khususnya tinggalan bawah air yang merupakan hasil interaksi manusia di masa lampau terkait aktifitas dan pola hidup masyarakat sebagai wujud refleksi kehidupan dalam menaklukkan lautan.



INDONESIA
map of indonesia

Sebagai negara maritim, Indonesia dalam sejarahnya menjadi jalur pelayaran dan perdagangan yang penting, mengingat letak Indonesia yang berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia dan jalur perdagangan maritim di kawasan Asia Tenggara, sehingga menjadi pemicu munculnya beberapa kerajaan besar dengan pelabuhan laut yang besar pula, mulai dari ujung barat hingga ujung timur kepulauan Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Gowa-Tallo, hingga kerajaan Ternate-Tidore. Selain sebagai jalur

penting dalam sejarah perdagangan dan pelayaran dunia, kepulauan Indonesia dalam sejarahnya juga memiliki kedudukan berarti pada saat terjadinya perang dunia. Hal inilah yang kemudian menyisakan berbagai tinggalan budaya yang berada di bawah laut yang dalam istilah arkeologi disebut sebagai tinggalan arkeologi bawah air.

Beragam tinggalan arkeologi bawah air tersebut tentunya memiliki karakteristik dan daya tarik tersendiri. Karakteristik dan daya tarik suatu tempat menjadi titik awal untuk pengembangan pariwisata, dimana daya tarik menjadi unsur utama yang diperlukan dalam pengembangan suatu produk pariwisata. Terkait dengan pariwisata, berbagai tinggalan sumberdaya arkeologi bawah air di Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata bahari. Oleh karena itu, perlu diketahui jenis dan potensi tinggalan bawah air yang ada sekaligus ancaman-ancaman kerusakan yang dihadapinya mengingat tinggalan sumberdaya arkeologi bawah air ini sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resorce*), sehingga diperlukan upaya maksimal dalam pelestariannya.

2. ARKEOLOGI BAWAH AIR

2.1. Pengertian Arkeologi Bawah Air

Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh manusia, baik di darat maupun di dalam air. Tinggalan arkeologi tidak hanya menunjuk pada budaya bendawi yang ditinggalkan manusia dari masa lalu, melainkan pula untuk semua jejak di luar budaya bendawi yang menunjukkan sisa-sisa aktivitas manusia. Tinggalan arkeologi merupakan data utama bagi arkeologi untuk menafsirkan kebudayaan. Dari data itulah para arkeolog bisa menjelaskan tentang kebudayaan manusia, baik tentang sejarah kebudayaan, rekonstruksi cara-cara hidup, maupun proses perubahan kebudayaan. Bidang arkeologi yang mempelajari data arkeologi yang berada di bawah air seperti laut, sungai, danau dan rawa disebut Arkeologi Bawah Air. Arkeologi bawah air sendiri merupakan bagian dari Arkeologi Maritim, dimana menurut Green (2004), Arkeologi Maritim berkenaan dengan aspek-aspek arkeologi dan teknik-teknik yang digunakan untuk menangani arkeologi dalam lingkungan bawah air. Istilah arkeologi maritim digunakan untuk menangani tinggalan arkeologi yang berhubungan dengan kebudayaan maritim baik yang letaknya di darat maupun yang berada di bawah air.

2.2. Potensi Arkeologi Bawah Air Indonesia

Sumberdaya arkeologi bawah air adalah sumber daya non hayati laut yang terdiri dari tinggalan-tinggalan budaya dan aktifitas manusia di masa lampau yang letaknya berada di bawah air.

Jika merujuk pada pengertian di atas, maka diketahui bahwa objek penelitian arkeologi bawah air bisa beragam. Akan tetapi yang paling sering menjadi fokus adalah kapal tenggelam (*ship wreck*), benda muatan kapal tenggelam (*BMKT*), lingkungan bawah air yang identik dengan perkembangan kebudayaan misalnya sungai-sungai purba yang terletak di dasar laut ataupun segala benda jejak tinggalan manusia yang tenggelam di dasar laut. Diantara objek tersebut, yang paling menyita perhatian banyak pihak adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

Potensi tinggalan cagar budaya bawah air di wilayah laut Indonesia cukup banyak dan beragam, Sebagaimana telah diketahui bahwa pada jaman dahulu perairan Indonesia menjadi jalur penting dalam lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia serta memiliki kedudukan berarti pada saat terjadinya perang dunia, sehingga beragam tinggalan arkeologi, khususnya tinggalan arkeologi bawah air seperti bangkai kapal karam, bangkai pesawat perang yang jatuh ke laut, serta benda-benda muatan kapal tenggelam seperti keramik dan guci-guci kuno banyak di temukan di perairan Indonesia.

Jumlah kapal yang hilang dan tenggelam di perairan nusantara jumlahnya sangat banyak sehingga sulit untuk dihitung. Dalam sebuah artikel di (*Inovasi Online Vol.6/XVIII/Maret 2006*) memberikan gambaran mengenai jumlah kapal karam yang terkandung di perairan Indonesia sebagai berikut :

- a. Kapal layar China telah mengarungi perairan Asia selama berabad-abad dan bertahun-tahun. Dari sekian banyak kapal tersebut telah banyak kapal-kapal yang membawa muatan yang tak ternilai harganya tenggelam di perairan nusantara.
- b. Pelayaran dari Portugal ke Atlantik Selatan, melalui Samudera Hindia dan ke Asia Tenggara perjalanannya membutuhkan waktu lama dan berbahaya. Sejak tahun 1650, sekitar 800 kapal Portugis berlayar dari Lisbon, dimana hampir 150 kapal tidak pernah lagi terdengar kabarnya. Kemungkinan hilang tanpa jejak.

- c. Antara tahun 1600 sampai dengan tahun 1800, English East India Company (EIC), telah kehilangan lebih dari 7000 kapal dan kebanyakan tenggelam ke dasar laut beserta muatannya.
- d. VOC Belanda juga telah kehilangan 105 kapal yang berlayar antara tahun 1602 dan 1794.

Potensi sumberdaya arkeologi bawah air yang dimiliki Indonesia terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke (barat-timur) serta dari Pulau Mingas hingga Pulau Rote (utara-selatan). Tinggalan arkeologi bawah air yang terletak di dasar laut ini, termasuk pula didalamnya berupa Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam atau lebih dikenal dengan istilah Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dimana belakangan ini marak menjadi sajian informasi di berbagai media baik media cetak maupun media elektronik. Adapun pengertian dari Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) ini adalah benda-benda berharga yang berasal dari semua kapal yang tenggelam di wilayah perairan territorial Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia yang mempunyai umur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun. Dari sumber DKP, berikut dibawah ini sebaran lokasi dan kuantitas BMKT di Indonesia.

Tabel Sebaran dan Lokasi (jumlah titik) BMKT di Indonesia

NO	DAERAH	LOKASI (TITIK)
1	Selat Bangka	7
2	Belitung	9
3	Selat Gaspar, Sumatera Selatan	5
4	Selat Karimata	3
5	Perairan Riau	17
6	Selat Malaka	37
7	Kepulauan Seribu	18
8	Perairan Jawa Tengah	9
9	Karimun Jawa, Jepara	14
10	Selat Madura	5
11	NTB/NTT	8
12	Pelabuhan Ratu	134

13	Selat Makassar	8
14	Perairan Cilacap, Jawa Tengah	51
15	Perairan Arafura, Maluku	57
16	Perairan Ambon Buru	13
17	Perairan Halmahera Tidore	16
18	Perairan Morotai	7
19	Teluk Tomini, Sulawesi Utara	3
20	Irian Jaya	31
21	Kepulauan Enggano	11
TOTAL		463

Sumber : DKP.go.id

Untuk perairan Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, potensi tinggalan cagar budaya bawah air serta benda muatan kapal tenggelam banyak pula tersebar di sekitar perairan Selat Makassar ataupun di sekitar Kepulauan Selayar, mengingat lokasi tersebut masuk dalam jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran penting pada jaman dahulu.

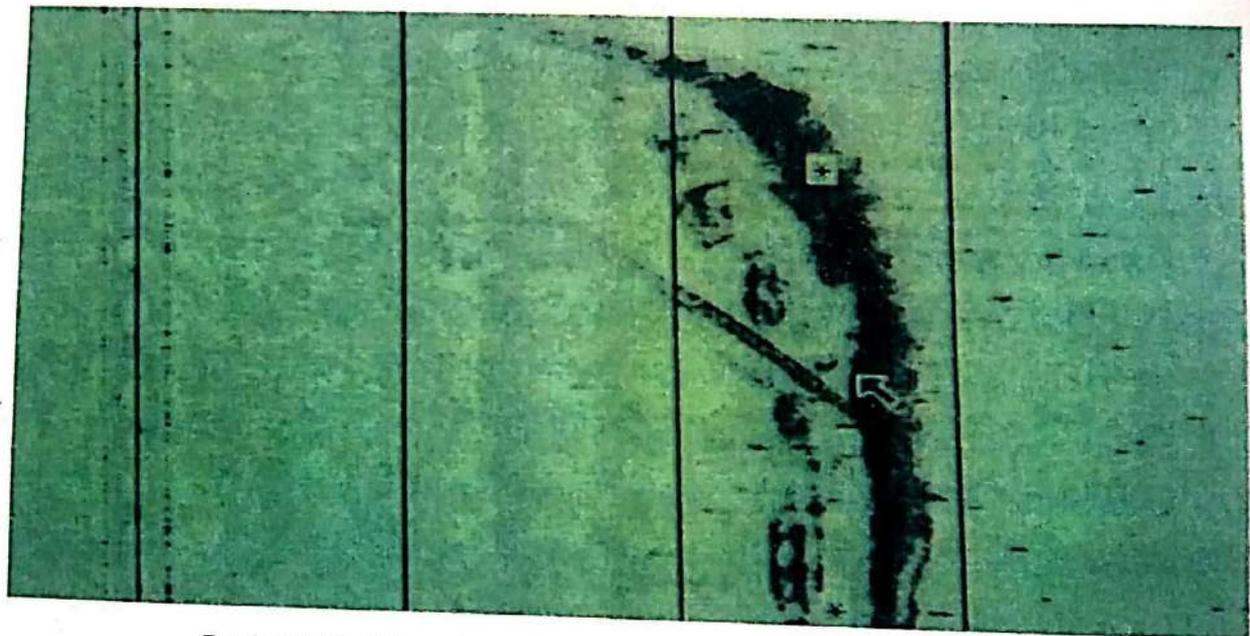
Di Kepulauan Selayar misalnya, bersumber dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Selayar, yang melakukan kajian mengenai potensi sumberdaya arkeologi bawah air, dimana hasil dari kajian tersebut menunjukkan beberapa titik lokasi yang berada di sekitar pantai barat dan selatan Pulau Selayar, sebagai berikut :

1. Sebaran artefak berupa pecahan keramik, pecahan botol, fragmen kayu dan logam dan lain-lain, yang diduga berasal dari kapal karam kuno yang belum diketahui asal usulnya di Perairan Tile-Tile, Desa Sangkulu-kulu, Kecamatan Bontosikuyu.
2. Puing kapal karam berupa fragmen besi dan kayu, sisa-sisa muatan kapal berupa keramik batubara, fragmen logam, fragmen tulang tengkorak dan fragmen botol kaca di Perairan Bahorea, Desa Taka Kappala

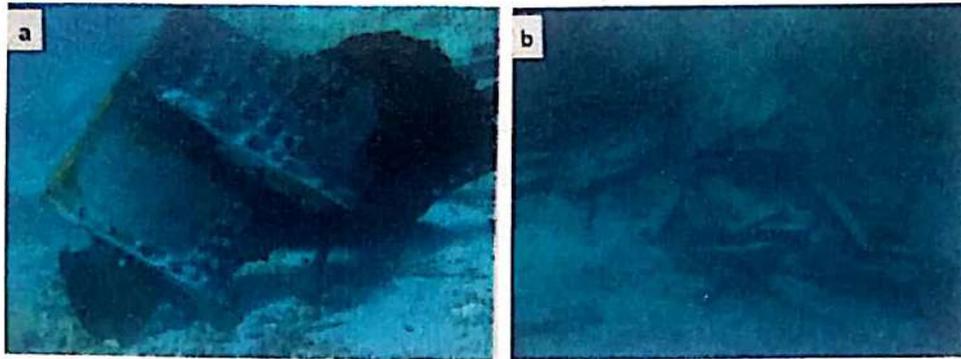
Selain itu, dari hasil interpretasi data *side-scan sonar* dan informasi dari masyarakat setempat, diduga terdapat :

1. Indikasi adanya kapal karam kuno yang belum diketahui asal-usulnya di Perairan Tile-Tile, Desa Sangkulu-kulu, Kecamatan Bontosikuyu.

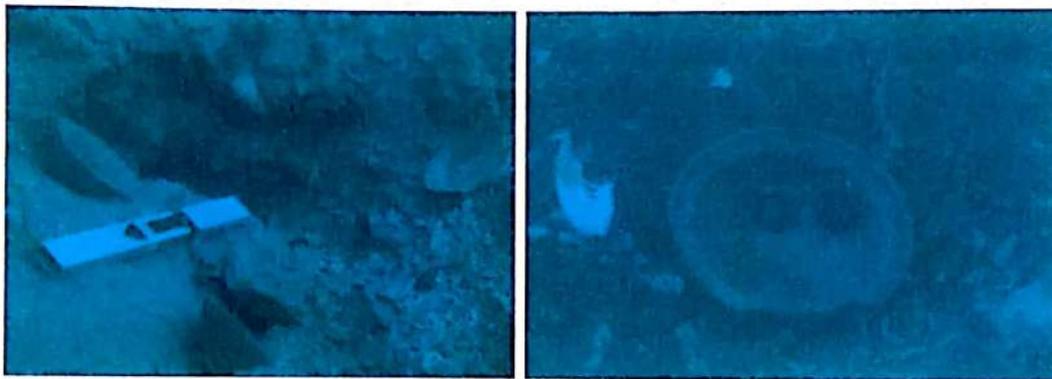
2. Indikasi adanya kapal karam kuno di Perairan Walvish, Kecamatan Bontoharu. Untuk Perairan Walvish ini, telah dilakukan servey oleh Pokja Bawah Air, Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar pada tahun 2009 yang melakukan pengamatan terhadap slide hasil scan sonar, dimana dari hasil scanning tersebut terdapat anomali berupa garis lengkung yang panjangnya sekitar 20 meter. Bentuk anomaly tersebut bisa jadi menyerupai sebuah pinggiran lambung perahu atau kapal, seperti yang tertera pada gambar dibawah ini.
3. Indikasi adanya meriam-meriam kuno di Perairan Benteng, Kelurahan Bontolembang, Kecamatan Bontoharu.
4. Indikasi adanya kapal karam kuno di Perairan Desa Appatanah Kecamatan Appatanah.



Gambar 1. Hasil Scan Sonar di sekitar Karang Walvish, Kec. Bontoharu
(Sumber : Laporan Survey Bawah Air di Kab. Selayar, 2009)



Gambar 2. Beberapa tinggalan arkeologi bawah air yang ditemukan di Perairan Bahorea, Taka Kappala, Kab. Selayar.
 A) Fragmen Besi Kapal; B) Fragmen Kayu dari Bangkai Kapal
 (Sumber : Artikel Pertemuan Ilmiah Tahunan IPB, 2010)



Gambar 3. Beberapa temuan pecahan keramik di Perairan Tile-Tile, Desa Sangkulu-kulu, Kec. Bontosikuyu
 (Sumber : Laporan Survey Bawah Air di Kab. Selayar, 2009)

Selain di Kepulauan Selayar, tinggalan kapal karam di temukan pula di sekitar perairan Pulau Samalona, Kota Makassar. Konon ada sekitar 7 (tujuh) buah kapal yang karam di kawasan pulau ini, dimana kapal-kapal karam tersebut merupakan tinggalan dari Perang Dunia ke-II. Kapal-kapal karam tersebut diantaranya Kapal Hakko Maru, kapal selam pemburu/gunboat yang merupakan kapal perang milik armada laut jepang yang berada pada kedalaman \pm 30 meter, Kapal Lancaster Bomber, serta Kapal Selam milik Jepang. Kapal-kapal yang karam tesebut telah berubah wujud menjadi rumpon atau tempat tinggal bagi biota-biota laut yang ada. Selain tinggalan cagar budaya bawah air yang ada di kepulauan selayar dan Pulau Samalona, masih banyak lagi potensi tinggalan arkeologi bawah air yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat dikembangkan dan dilestarikan keberadaannya.

Di Indonesia, sumberdaya arkeologi bawah air, khususnya tinggalan cagar budaya bawah air merupakan benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Begitupun halnya dengan potensi tinggalan arkeologi bawah air selain dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, juga dapat dimanfaatkan untuk pariwisata, diantaranya wisata bahari (wisata selam, snorkeling) dan wisata minat khusus (seperti wisata ziarah). Namun perlu digarisbawahi, untuk pemanfaatan tinggalan arkeologi bawah air perlu dilakukan secara hati-hati mengingat sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) dan sangat rapuh terhadap ancaman dari luar, baik pengaruh/kondisi alam ataupun dari bentuk aktivitas manusia.

2.3. Sumberdaya Arkeologi Bawah Air sebagai Daya Tarik Wisata

Daya tarik suatu tempat merupakan titik awal bagi pengembangan pariwisata, dimana hal tersebut menjadi unsur paling penting dari suatu produk pariwisata. Tanpa adanya daya tarik yang substansial, pariwisata khususnya yang bersifat kesenangan (*pleasure-oriented tourism*), sulit untuk dikembangkan (Inskeep, 1991). Selanjutnya menurut Inskeep (1991), daya tarik wisata dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut :

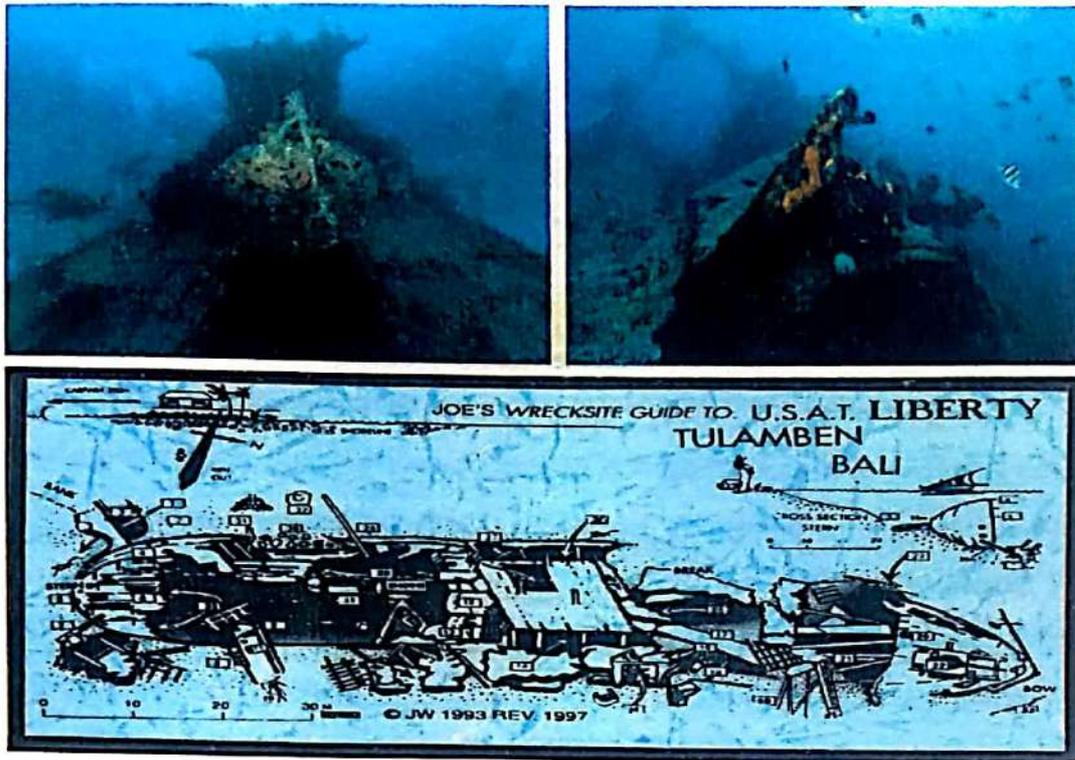
- ✓ Daya tarik alam yang didasarkan pada karakteristik lingkungan alam;
- ✓ Daya tarik budaya yang didasarkan pada aktivitas manusia;
- ✓ Daya tarik khusus yang dibuat secara artificial.

Jenis daya tarik budaya yang didasarkan pada aktivitas manusia, termasuk didalamnya situs-situs arkeologi, sejarah dan budaya. Berbagai daya tarik budaya telah menjadi daya tarik tersendiri di hampir semua belahan dunia, sebagai contoh Candi Borobudur di Indonesia, Taj Mahal di India dan masih banyak lagi warisan-warisan dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia (*world heritage sites*).

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka sumberdaya arkeologi bawah air dapat digolongkan kedalam jenis daya tarik budaya, sebagai contoh yang telah terkenal dan telah menjadi daya tarik wisata dunia adalah Kapal Vasa, yang dipamerkan secara permanen di Museum Vasa, Stockholm, Swedia. Vasa adalah kapal perang Swedia yang tenggelam pada saat pelayaran perdananya pada tahun 1628, dan pada tahun 1961 dilakukan pengangkatan terhadap hampir seluruh badan kapal (Wikipedia).

Di Indonesia sendiri, sumberdaya arkeologi bawah air belum menjadi suatu daya tarik wisata yang banyak diminati dibanding dengan daya tarik alam lainnya yang sudah lebih dulu dikenal keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya. Namun, belakangan ini semakin banyak wisatawan baik individu maupun kelompok, melakukan aktivitas wisata dengan mengunjungi tinggalan arkeologi laut, khususnya arkeologi bawah air, diantaranya yang telah menjadi daya tarik wisata bahari adalah Liberty Wreck yang terletak di Perairan Tulamben, Bali. Liberty Wreck adalah bangkai kapal kargo milik Tentara Amerika Serikat yang pada masa Perang Dunia I ditorpedo oleh Jepang pada tanggal 11 Januari 1942, saat melintasi Selat Lombok dalam pelayarannya dari Filipina menuju Australia (Wikipedia). Saat ini Tulamben dengan ikon Liberty Wrecknya (Liberty Wreck sendiri menjadi rumpon bagi biota laut) dan keanekaragaman biota lautnya menjadi salah satu lokasi penyelaman yang paling terkenal di Indonesia.

Selain Liberty Wreck, di Indonesia dikenal juga lokasi penyelaman Manado Wreck, berupa bangkai kapal dagang Jerman yang tenggelam pada tanggal 22 Februari 1942. Manado Wreck berada di perairan Pantai Molas, Teluk Manado, di dekat Taman Laut Nasional Bunaken. Disamping itu masih banyak bangkai kapal dan pesawat perang Jepang dan Amerika peninggalan Perang Dunia II yang terdapat di lepas Pantai Makassar, tepatnya di sekitar Perairan Pulau Samalona. Di perairan sekitar wilayah Kepala Burung Papua juga diketahui banyak terdapat sumberdaya arkeologi bawah air berupa bangkai-bangkai kapal dan pesawat perang tinggalan Jepang dan Amerika. Seiring dengan berkembangnya Raja Ampat sebagai salah satu tujuan wisata bahari, maka potensi sumberdaya arkeologi bawah air yang ada di sekitarnya juga mulai mendapat perhatian. Begitupun halnya dengan potensi arkeologi bawah air yang berada di sekitar perairan Makassar, sebaiknya diperhatikan dan dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata bahari.



Gambar 4. Liberty Wreck di Tulamben, Bali (Sumber : Wikipedia.org)

3. EKOWISATA

Pariwisata adalah salah satu industri yang tumbuh paling cepat dan merupakan sumber pemasukan devisa negara. Ekowisata memiliki potensi menjadi suatu alat pembangunan berkelanjutan yang penting, memiliki potensi untuk memunculkan dampak lingkungan dan social yang positif. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ekowisata telah berkembang dengan pesat, namun ekowisata ini dapat pula berpotensi merusak apabila tidak ditangani dengan benar. Perencanaan dan pengelolaan yang benar sangat penting bagi pengembangan ekowisata, karena jika tidak ditangani dengan baik maka akan mengancam keanekaragaman hayati dan budaya yang menjadi andalan ekowisata (Wood, 2002).

Adapun definisi dari ekowisata adalah suatu perjalanan atau kunjungan yang bertanggungjawab ke kawasan alam yang relatif tidak terganggu, dalam rangka menikmati dan mengapresiasi alam dan karakteristik budaya apapun yang ada, baik di masa lampau ataupun sekarang, yang mendorong konservasi, memiliki dampak negative pengunjung yang rendah dan memberikan manfaat keterlibatan sosial ekonomi masyarakat local secara aktif (Wood, 2002).

3.1 Pengembangan Ekowisata Bahari di Indonesia

Saat ini perkembangan sektor pariwisata di Indonesia semakin pesat dan dirasakan menjadi semakin penting sebagai penggerak pembangunan sosial ekonomi negara selain sebagai salah satu sumber pendapatan devisa negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah Indonesia memiliki karakteristik sebagai daerah yang memiliki keanekaragaman hayati laut serta keanekaragaman budaya bahari yang tinggi, terkait sejarah panjang budaya bahari yang terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu.

Hal tersebut diatas menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dalam hal daya tarik alam dan budaya yang beragam bagi upaya pengembangan ekowisata bahari. Dalam pengembangan ekowisata bahari, sebaiknya tetap berpegang pada prinsip pelestarian dan pembangunan berkelanjutan, dimana dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan meminimalkan timbulnya dampak negative bagi alam dan budaya yang ada.

3.2 Pengembangan Sumberdaya Arkeologi Bawah Air untuk Ekowisata Bahari

Sumberdaya Arkeologi Bawah Air merupakan salah satu aspek yang berarti dalam sejarah perkembangan Indonesia. Terkait dengan pariwisata, berbagai tinggalan sumberdaya arkeologi bawah air memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata bahari. Sumberdaya arkeologi bawah air memiliki karakteristik tersendiri sehingga menjadi daya tarik yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Tetapi disisi lain perlu diingat bahwa sumberdaya arkeologi bawah air ini merupakan sumberdaya yang sifatnya rapuh dan tidak dapat diperbaharui. Berbagai ancaman terhadap keberadaan sumberdaya arkeologi bawah air ini tidak hanya datang dari aktifitas manusia baik yang disengaja atau tidak, tetapi dapat pula bersumber dari aktifitas alam seperti pengaruh arus dan gelombang, belum lagi ancaman degradasi terhadap material pembentuknya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, kimia dan biologis yang dapat terjadi disekitar lingkungan situs bawah air.

Oleh karena itu, terkait dengan upaya pengembangan sumberdaya arkeologi bawah air sebagai ekowisata bahari, perlu dilakukan studi lebih lanjut terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman secara detail dan menyeluruh tentang tinggalan arkeologi bawah air beserta kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai syarat untuk merencanakan upaya perlindungan dan pengelolaan sumberdaya arkeologi bawah air secara efektif. Pengembangan sumberdaya arkeologi bawah air untuk ekowisata bahari harus

menjamin aspek pelestarian dan keberlanjutan manfaatnya untuk jangka panjang. Pengelolaan sumberdaya arkeologi bawah air yang tidak tepat justru akan menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran situs, termasuk seluruh potensi yang dimilikinya, baik potensi sejarah, ilmu pengetahuan, sosial maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009. *Laporan Survey Situs Bawah Air dan Pengecekan Sebaran Temuan Cagar Budaya Bawah Air di Kab. Selayar*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- Anonim, 2013. *Laporan Survey Bawah Air di Perairan Pulau Samalona Kota Makassar*. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.
- Artikel, 2006. *Inovasi Online Vol.6/XVIII/Maret 2006*.
- Dinas Budpar Selayar, 2008. *Kajian Potensi Sumberdaya Arkeologi Laut di Perairan Pulau Selayar. Laporan Akhir Kegiatan Riset Tahun 2008*. Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan & Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Selayar.
- Green, Jeremy, 2004. *Maritime Archeology*. Wawasan Arkeologi.html
- Inskeep, E, 1991. *Perencanaan Pariwisata: Sebuah Integrasi dan Pembangunan Berkelanjutan*. Wacana Pengelolaan Lingkungan.html
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- Wood, M.E, 2002. *Ekowisata : Principles, Practice and Policies for Sustainability*. Wacana Pengelolaan Lingkungan.html
- Wacana Vol. 9 No. 1, April 2007. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Mundarjito. Paradigma Dalam Arkeologi Maritim*.
- www.academia.edu
- www.wikipedia.org
- www.arkeologibawahair.blogspot.com
- www.divetowreck.blogspot.com

BANGUNAN KOLONIAL BELANDA DI MALINO KABUPATEN GOWA

Oleh: **ARSANDI, S.S**

(**Alumni Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin**)

A. Pendahuluan

Malino sebagai daerah hunian bagi suatu masyarakat mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dalam perjalanan sejarahnya, jauh sebelum Malino menjadi tempat wisata seperti sekarang, Pemerintah Hindia Belanda telah menjadikan daerah ini sebagai tempat peristirahatan bagi para pegawai pemerintahan kolonial (Tika ed., 2007: 12). Selain itu, Malino pula menjadi markas pertahanan Hindia Belanda di wilayah timur. Disanalah pertama kali Negara Indonesia Timur (NIT) dicetuskan oleh Van Mook pada konferensi 15-25 Juli 1946 (Kulle, dkk., 2005: 102) sebagai upaya memecah belah persatuan bangsa Indonesia.

Jejak peninggalan Belanda di Malino masih bisa terlihat dari berbagai tinggalan arkeologi berupa villa, rumah tinggal, dan markas tentara, dimana bangunan-bangunan tersebut memiliki ciri serta atribut-atribut arsitektur yang unik, dan menarik untuk diteliti. Bangunan kolonial Belanda di Malino merupakan tinggalan arkeologis yang mempunyai nilai sejarah dan budaya. Keberadaannya pada masa lalu memiliki peran penting bagi Bangsa Belanda. Selain itu bangunan kolonial di Malino merupakan saksi bisu peristiwa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan secara fisik bangunan-bangunan tersebut memberikan informasi tentang pengaruh budaya Belanda pada masa lalu, apalagi dalam bentuk karya seni arsitektur bangunan. Dalam kaitannya dengan kajian arkeologi, pada dekade belakangan ini telah berkembang sebuah bidang kajian dalam ilmu arkeologi yang bernama Arkeologi Arsitektur (Stedman, 1996 dalam Funari dan Zarankin, 2003: 25), bidang kajian tersebut menawarkan beragam cara menganalisis untuk membaca kebudayaan manusia masa lalu, utamanya mengenai arsitektur bangunan kolonial. Melalui arsitektur sebenarnya kita dapat membaca karakter dan eksistensi suatu masyarakat dimasa lalu yang memiliki keistimewaan tersendiri (Pratiwo, 2009: xxi).

Dalam kajian arkeologi, arsitektur bangunan kolonial merupakan suatu bentuk kebudayaan yang mengandung informasi yang luas tentang kehidupan masa lalu. Itu disebabkan karena bangunan kolonial tercipta karena suatu ide dan aktifitas, arsitektur bangunan merupakan suatu artefak dari hasil kebudayaan manusia pada masa lalu sehingga dapat dikaji secara

arkeologis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zarankin (2005: 237) bahwa arsitektur bangunan merupakan hasil budaya karena dirancang dan dibangun oleh manusia.

Kebudayaan dan arsitektur mempunyai hubungan yang sangat erat. Dikatakan demikian karena arsitektur merupakan gejala dasar dari unsur-unsur budaya yang secara tidak langsung terkait dengan kondisi iklim, teknologi, bahan dan ekonomi yang mempengaruhi arsitektur suatu bangunan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Amost Rappoport (dalam Oesman, 1996: 8) bahwa arsitektur merupakan hubungan perilaku manusia dengan lingkungannya. Sehingga atas dasar hal-hal inilah penulis ingin mengkaji tentang bangunan-bangunan kolonial Belanda yang ada di Malino sebagai objek penelitian berdasarkan tinjauan arkeologi. Karena salah satu aspek arkeologi adalah merekonstruksi kehidupan masa lalu yang dikaji melalui peninggalan materialnya seperti arsitektural suatu bangunan.

B. Permasalahan

Bangunan-bangunan kolonial di Malino secara arkeologis belum pernah diteliti, karena dari beberapa penelitian sebelumnya, hanya dilakukan di kota besar saja khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan, dimana secara geografis Makassar berada di dataran rendah dan merupakan wilayah perkotaan yang identik dengan gedung-gedung besar, dan laporan penelitian yang pernah dilakukan diantaranya yaitu Abdul Haed (1991) yang mengkaji tentang Arsitektur Kelenteng Ibu Agung Bahari Makassar, Rizal Randa (2002) dengan kajian Arsitektur Gereja Protestan Imanuel Makassar, Suhartiyah Umar (2003) dengan kajian tentang Peninggalan Bangunan Kolonial di dalam Fort Rotterdam, Surianti (2003) dengan kajian Arsitektur Bangunan Kolonial Pengadilan Negeri Makassar, Buhanis Ramina (2005) dengan kajian Arsitektur Gedung Mulo. Adapun Malino yang merupakan daerah pedalaman, mempunyai iklim dan lingkungan yang berbeda dengan kota kolonial lainnya yang ada di Sulawesi Selatan.

Arsitektur kolonial diberbagai tempat di Indonesia memiliki perbedaan maupun persamaan yang dipengaruhi oleh lingkungan geografisnya. Penjajahan yang cukup lama oleh pihak asing membuat terjadinya percampuran budaya antara budaya Belanda dengan budaya lokal yang terdapat di Indonesia (Sumalyo, 1995: 2). Namun pencampuran budaya tersebut tidaklah serta merta terjadi begitu saja, tentu melalui proses yang cukup lama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Helen Jessup dan Josef Prijotomo yang telah membagi periode perkembangan bangunan

Kolonial Belanda di Indonesia ke dalam tiga atau empat periode, diantaranya. Menurut Helen Jessup (1984, dalam Fitri, 2006; 61-64) perkembangan gaya bangunan Kolonial Belanda terbagi atas empat priode, yaitu:

- (1) Tahun 1700-an adalah periode kekuasaan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (V.O.C) di Indonesia. Pada masa ini bangunan-bangunan didirikan mengikuti gaya bangunan dari Negeri Belanda tanpa mempertimbangkan kondisi iklim dan budaya setempat.
- (2) Tahun 1800-an hingga 1902, yaitu masa peralihan dari periode kekuasaan VOC ke periode kekuasaan Kerajaan Belanda. Pada masa ini bangunan-bangunan berkesan megah didirikan untuk menunjukkan kekuasaan yang berkuasa, dan umumnya bergaya arsitektur neo-klasik.
- (3) Tahun 1902 hingga 1920-an, politik etis diberlakukan di Indonesia, yang berdampak pada pembangunan bangunan-bangunan modern yang lebih berorientasi ke Belanda.
- (4) Tahun 1920 hingga 1940-an. Pada masa ini, gerakan pembaruan dalam arsitektur bermunculan serta memunculkan gaya campuran dan berbagai gaya arsitektur, misalnya *Art Deco*.

Josef Prijotomo (dalam Abbas, 2006: 230) membagi periode perkembangan gaya arsitektur bangunan Kolonial Belanda ke dalam tiga periode, yaitu:

- (1) Abad XVII hingga akhir Perang Dunnia II berkembang gaya seni bangun neo-klasik seperti yang terdapat di Belanda.
- (2) Akhir abad XIX hingga awal abad XX, bangunan kolonial telah dipengaruhi oleh arsitektur tradisional Indonesia, baik dalam penggunaan bahan maupun gaya bangunan.
- (3) Tahun 1930-an, gaya bangunan telah mendapat percampuran berbagai gaya, yang bisa dilihat contohnya pada beberapa masjid di Medan, Banda Aceh, dan Pulau Penyengat yang dibangun dengan gaya Moor, hingga Istana Sultan Bima yang dibangun pada pertengahan tahun 1930-an.

Bangunan-bangunan tua yang terdapat di Malino berdasarkan data sejarah tulisan dan maupun lisan yang penulis dapatkan, bangunan tersebut telah ada sejak masa kolonial yaitu antara tahun 1920an-1940an. Bila dihubungkan dengan Periode perkembangan bangunan Kolonial Belanda yang dikemukakan oleh para ahli, bangunan kolonial yang ada di Malino

masuk pada priode akhir perkembangan bangunan kolonial di Indonesia. Maka dari itu perlu tindak lanjut lebih jauh untuk melanjutkan penelitian ini.

Dari hasil pengamatan di lapangan penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor maupun hal-hal yang menunjukkan ciri-ciri tertentu pada setiap bangunan di Malino. Faktor-faktor yang penulis maksudkan, yaitu bentuk arsitektur bangunan dan atribut-atribut yang melekat pada setiap bangunan seperti pondasi, dinding, jendela, tiang, atap dan penataan ruangan, selain itu penulis juga mengamati penataan bangunan-bangunan kolonial yang ada di Malino, karena menurut sejarah, Malino merupakan tempat dimana berlangsungnya konfrensi pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) pada tahun 1946, dalam hal ini, tentu pemerintah Belanda mempunyai alasan kenapa penyelenggaraan konfrensi dilakukan di Malino.

Dari beberapa faktor maupun hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya, maka artikel ini difokuskan pada upaya untuk memaparkan bentuk arsitektur bangunan-bangunan kolonial Belanda yang ada di Malino, serta model dan sistem keamanan yang tercipta dalam penempatan bangunan-bangunan kolonial Malino.

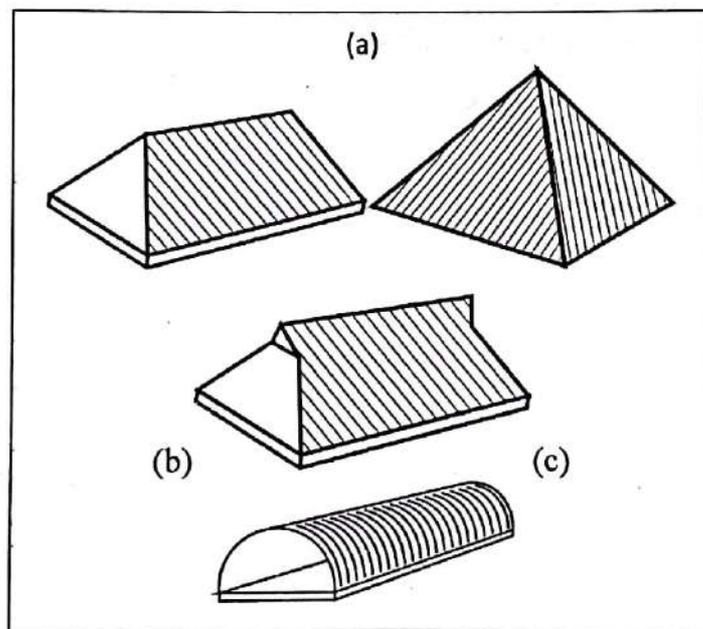
C. Pembahasan

Sejarah menunjukkan bahwa koloni Belanda secara bertahap menguasai wilayah Indonesia yang awalnya hanya kegiatan perdagangan V.O.C yang mulai pada tahun 1602. Dari semenjak awal masuknya Belanda sampai dilanjutkan penjajahan selama kurang lebih 350 tahun, sehingga dengan koloni yang dilakukan itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Fauzy, dkk, 2013: 1). Salah satu dari aspek tersebut dapat dilihat dalam bentuk arsitektur bangunan yang tidak dapat dipungkiri bahwa para arsitek Belanda tidak sedikit menerapkan konsep lokal, tradisional dan iklim dalam membuat suatu bangunan (Sumalyo, 1993: 3).

Kepekaan arsitek Belanda terhadap iklim dan lingkungan tropis terlihat dari elemen-elemen bangunan untuk mengatur penghawaan, pencahayaan dan juga perlindungan terhadap hujan (Sukawi, Iswanto, 2011: 90). Beberapa prinsip yang sangat diperhatikan pada rancangan arsitektur kolonial yang berkaitan dengan iklim tropis lembab. Pertama adalah upaya untuk mencegah sinar matahari langsung kedalam bangunan, hal tersebut diantisipasi dengan membuat teras atau selaras pada bangunan dan upaya pencegahan terpaan air hujan terhadap bangunan

dengan membuat teritisan, prinsip kedua adalah dengan membuat ventilasi udara yang baik pada bangunan dan bukaan sebanyak mungkin untuk mengoptimalkan sirkulasi udara terutama saat jendela ditutup (Handinoto, 1999: 100). Berdasarkan pengamatan di lapangan, bentuk-bentuk arsitektur kolonial Belanda pada bangunan-bangunan di Malino, terlihat pada komponen atap; jendela; dinding; pintu; ventilasi; lantai; pondasi dan perapian. Berikut di bawah ini uraian dari masing-masing komponen tersebut.

Tipikal desain elemen atap bangunan kolonial Belanda di Malino dikategorisasikan kedalam lima tipe atap, yang meliputi. (a) bentuk atap limasan, (b) bentuk atap limasan bersingap, (c) bentuk atap lengkung, (d) gabungan pelana dengan limasan persegi banyak, (e) gabungan limasan dengan kerucut.

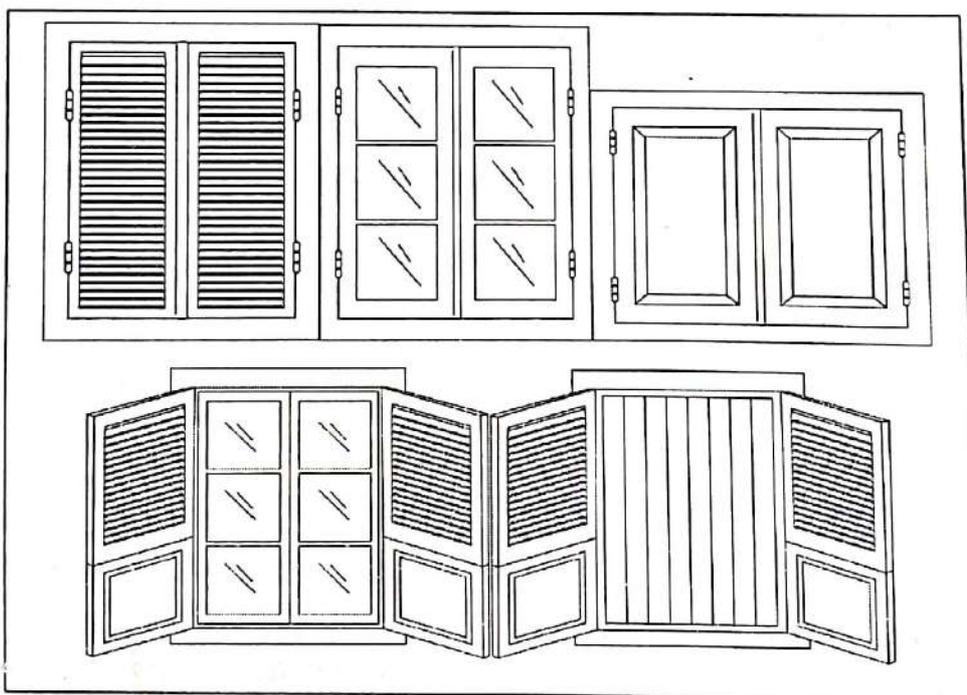


Tipikal desain elemen atap bangunan kolonial Belanda di Malino

Atap yang tinggi dengan kemiringan yang tidak terlalu terjal serta tidak ditemukannya *lucarne* menunjukkan adanya perubahan karakter bangunan dari pengaruh klasik eropa. Ciri khas atap arsitektur Belanda yakni bentuk limasan lebih dominan dipakai pada bangunan-bangunan militer dan peristirahatan yang ada di Malino, justru penggunaan atap pelana yang juga merupakan ciri khas arsitektur Belanda hanya terdapat pada dua bangunan saja namun itu juga telah dipadukan dengan atap limasan, penulis berasumsi bahwa kemiringan atap pada

bangunan-bangunan ini tidak terlalu diperhatikan oleh arsitek karena telah diketahui bahwa daerah Malino merupakan daerah yang sejuk dan banyak terdapat pohon-pohon yang tinggi seperti pohon pinus yang dapat menghalau sinar matahari langsung terhadap bangunan. Selain itu atap bangunan lebih lebar dari pada luas denah bangunan, sehingga atap juga berfungsi sebagai *Tritisan* ketika hujan turun.

Adapun elemen jendela merupakan elemen bukaan pada suatu bangunan rumah, yang memiliki peranan penting dalam memberikan kenyamanan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jendela pada umumnya mempunyai fungsi seperti pergantian sirkulasi udara, memasukkan cahaya ke dalam ruangan, penghubung visual dari sisi dalam maupun luar, dan jendela juga dapat mempercantik rumah (Hersanti, dkk, 2008; 158). Bangunan-bangunan kolonial Belanda dalam kawasan Malino menggunakan berbagai macam jenis jendela yang berciri khas Eropa. Bentuk-bentuk jendela pada bangunan-bangunan kolonial Belanda yang ada di Malino dapat dikategorisasikan ke dalam empat tipe yaitu (1) jendela kaca dengan panel kayu, (2) jendela berbahan kayu polos, (3) jendela kayu krepyak, (4) jendela bersusun dua gabungan krepyak dengan jendela kaca panel kayu.



Bentuk-bentuk jendela pada setiap bangunan

Fungsi jendela pada bangunan-bangunan kolonial Belanda yang ada di Malino selain sebagai tempat keluarnya masuknya udara, pemberian bahan kaca pada jendela dimaksudkan

agar bangunan dapat mendapatkan pencahayaan alami dari matahari, melindungi dari terpaan air hujan serta memberikan keleluasaan untuk memantau aktifitas yang ada diluar bangunan. Selain itu beberapa bangunan juga terdapat jendela yang terbuat dari kayu yang disusun miring (krepyak) dimaksudkan untuk mengurai masuknya debu atau air kedalam bangunan sekaligus tidak menghalangi keluar masuknya udara ke dalam bangunan dan ada juga jendela yang bersusun dua dengan menggunakan dua model yakni berbahan kaca dengan bingkai pada bagian dalam sedangkan bagian luar menggunakan model krepyak berdaun ganda.

Sedangkan bagian dinding adalah elemen arsitektur yang penting pada setiap bangunan. Secara tradisional dinding telah berfungsi sebagai struktur pemikul langit-langit dan atap (Francis D.K. Ching, 1996: 176). Selain itu dinding juga berfungsi sebagai elemen pemisah ruang dalam bangunan, sebagai perlindungan dari hawa dingin dan juga sebagai perlindungan dari segala ancaman bahaya seperti binatang buas dan lain-lain. Dinding bangunan-bangunan colonial Belanda di kawasan Malino memiliki ketebalan dan bahan yang bervariasi, adapun bahan yang digunakan yakni dinding berbahan rang kawat yang disemen, jenis dinding tersebut terdapat pada bangunan SMPN 1 Tinggimoncong dan bangunan IV Asrama Militer Ahmad Yani Malino, dan sebagian lagi memiliki dinding berbahan batu hitam yang disemen dan ada juga yang menggunakan bahan papan kayu bersusun dan saling menindih. Penulis berasumsi bahwa ketebalan dinding dan bahan bangunan juga tidak terlalu diperhatikan oleh arsitek hanya lebih kepada fungsinya saja sebagai bangunan militer, dan tempat peristirahatan bagi para tentara sekaligus sebagai pos keamanan semata. Berdasarkan fungsi dinding tersebut maka dinding bangunan-bangunan militer di Malino berfungsi sebagai keamanan, sebagai penghalang pandangan dari orang luar dan yang paling utama adalah berfungsi sebagai penyangga pada bagian atap, penghalang panas, dan hempasan angin maupun hujan yang datang dari luar (Silaban, 1983: 57).

Pada elemen pintu tidak hanya sebagai pembatas antar ruang, tetapi juga sebagai akses masuk, transisi ruang, penghubung antar ruang, dan sekaligus pengaman (Hersauti, dkk, 2008; 158). Pintu pada bangunan-bangunan kolonial Belanda di Malino memiliki bentuk-bentuk yang sederhana yakni bentuk-bentuk geometris dan simetris tanpa menggunakan ornamen-ornamen yang begitu mencolok dimana pintu-pintu tersebut dapat dikategorikan kedalam empat tipikal bentuk yakni (1) pintu daun ganda berbahan kaca dengan panel kayu, (2) pintu daun ganda

berbahan kayu tanpa kaca, (3) pintu daun tunggal berbahan kaca dengan panel kayu, (4) pintu daun tunggal berbahan kayu dengan bentuk persegi dan (5) tapal kuda.

Pintu-pintu pada bangunan-bangunan kolonial Belanda di Malino didesain dengan bentuk yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan. Material pintu juga dipengaruhi oleh fungsi dan letaknya pada suatu bangunan (Hersanti, dkk, 2008; 164-165), ini bisa dilihat pada pintu utama bangunan, hampir semua pintu utama bangunan menggunakan model pintu berdaun ganda berbahan kaca dengan bingkai kayu sedangkan pintu samping dan pintu penghubung ruangan hanya menggunakan bahan kayu dengan model daun ganda dan tunggal. Penulis berasumsi bahwa maksud dari penggunaan bahan kaca pada pintu utama sama dengan maksud dari penggunaan kaca pada jendela yakni agar bangunan dapat mendapatkan pencahayaan alami dan keleluasaan memantau aktifitas diluar bangunan, selain itu penggunaan kaca memberikan kesan sebagai bagian penting pada suatu bagian bangunan yang harus membutuhkan pencahayaan yang cukup.

Untuk komponen lantai yang merupakan salah satu komponen yang menunjang kestabilan berdirinya bangunan dan bagian paling dasar dari bangunan. Lantai pada bangunan-bangunan kolonial Belanda di Malino kebanyakan telah diganti pada saat renovasi bangunan, karena ubin yang asli sudah tidak layak pakai, namun ada dua bangunan yang masih menggunakan ubin yang asli yakni bangunan I dan III asrama militer Ahmad Yani Malino. Pada bangunan I ubin menggunakan bahan semen yang dibentuk kotak berukuran 20 x 20 cm dan disusun sejajar, sedangkan bangunan III menggunakan lantai yang terbuat dari bahan kayu, penulis berasumsi bahwa penggunaan bahan kayu pada lantai bangunan III asrama militer Ahmad Yani Malino merupakan adaptasi terhadap lingkungan dan arsitektur lokal bugis-makassar yang menggunakan lantai berbahan kayu. Selain itu penggunaan kayu bisa mereduksi panas dan dapat menghangatkan suhu dalam ruangan pada malam hari (Juhana, 2001; 159).

Pada elemen lain, yaitu ventilasi yang merupakan tempat sirkulasi udara yang biasanya ditempatkan di atas kuseng jendela, juga berfungsi untuk mengurangi penumpukan udara panas di dalam ruangan terutama pada saat jendela dan pintu ditutup (Sukawi, Iswanto, 2011; 92). Ventilasi yang digunakan pada bangunan-bangunan kolonial Belanda di Malino terdiri dari beberapa macam bentuk. Bentuk-bentuk ventilasi tersebut yaitu (1) bentuk *oculus* split glas, (2) bentuk persegi panjang berbahan kaca panel kayu, dan (3) segi empat berbahan kaca panel kayu.

Ventilasi Oculus split glas terdapat pada bangunan I dan II asrama militer Ahmad Yani Malino, Ventilasi persegi panjang berbahan kaca panel kayu terdapat pada bangunan II, III, IV dan V asrama militer Ahmad Yani Malino, Gereja Ratna Miriam, Bangunan V Pasangrahan Malino, Sedangkan Ventilasi segi empat berbahan kaca panel kayu hampir semua bangunan memilikinya.

Pada komponen lainnya yaitu pondasi sebagai penyangga bangunan yang ada di atasnya, sehingga baik buruknya dan kuatnya bangunan di atasnya sangat tergantung kepada pondasinya (Daryanto, 2000: 69). Dengan demikian pondasi harus dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah hancur sehingga kerusakan bagian bangunan di atasnya. Jika ditinjau dari kegunaan pondasi pada bangunan-bangunan tersebut menunjukkan bahwa pondasi tersebut hanyalah penahan bangunan semata agar tidak tenggelam dan terperosok ke dalam tanah.

Elemen lainnya yaitu perapian yang merupakan ornamen tambahan pada bangunan-bangunan kolonial Belanda di Malino. Perapian di Malino dilengkapi oleh cerobong asap pada sebagian bangunan diantaranya yaitu bangunan I, II, III, IV asrama militer Ahmad Yani Malino dan bangunan V Pasangrahan Malino. Peranan perapian dalam sebuah rumah sangat beragam yakni untuk menghangatkan badan serta mengawetkan bahan bangunan selain itu, peranan sebuah perapian juga memberikan spirit tentang kerlangsungan sebuah kehidupan atau keselamatan sebuah masyarakat (Dewi, 2005; 94). Penulis berasumsi bahwa perapian pada sebagian bangunan kolonial Belanda di Malino menunjukkan adanya kesadaran arsitek terhadap iklim Malino yang memiliki karakteristik iklim cenderung sejuk dan dingin.

Penempatan bangunan-bangunan kolonial di Malino memperlihatkan suatu strategi penempatan bangunan sesuai dengan pemanfaatan lahan yang tersedia. Arsitek nampaknya berhasil memanfaatkan lahan yang cukup luas di Malino. Lebih jauh nampaknya para arsitek Belanda mulai meninggalkan kebiasaan mereka yang seringkali dalam perancangan bangunan halaman cenderung diabaikan. Pada umumnya di negeri Belanda para arsitek mengalami keterbatasan lahan negeri mereka, sehingga diciptakan sebuah solusi dengan memaksimalkan penggunaan ruang vertical, terciptalah bangunan bersusun. Kebiasaan ini pula pada awalnya diterapkan di Indonesia, namun para arsitek menyadari bahwa bukanlah keterbatasan lahan yang dihadapi di Indonesia melainkan iklim yang berbeda. Akhirnya para arsitek merancang bangunan yang lebih beradaptasi dengan lingkungan (Lippsmeier, 1997: 1-2).

Selain itu orientasi dan penempatan bangunan-bangunan Kolonial Belanda di Malino memiliki unsur strategi keamanan militer. Jika diamati melalui peta sebaran bangunan, Pasanggrahan Malino, dan Panti Samadi Ratna Miriam sebagai bangunan tempat kediaman gubernur Belanda, sekaligus sebagai tempat diadakannya konferensi Malino pada tahun 1946 diapit oleh bangunan militer yakni dari arah barat laut terdapat SMPN 1 Tinggimoncong dan dari arah tenggara terdapat Asrama Militer Ahmad Yani. SMPN 1 Tinggimoncong merupakan bekas mess tentara Belanda sekaligus sebagai Pos dan cek poin ketika masuk Malino pada masa itu, bangunan ini berada tepat pada tikungan tidak jauh dari pintu gerbang masuk wilayah Malino, bila diperhatikan kita dapat memantau aktifitas pada areal bangunan ini ketika berdiri tepat didepan pintu gerbang masuk Panti Samadi Ratna Miriam (tempat konferensi Malino diadakan) yang memiliki ketinggian yakni 1946 mdpl lebih tinggi daripada bangunan SMPN 1 Tinggimoncong yakni 975 mdpl. Selain itu keamanan juga terlihat adanya bangunan-bangunan militer pada kompleks Asrama Militer Ahmad Yani yang terdapat di bagian tenggara Pasanggrahan Malino dan Panti Samadi Ratna Miriam.

Malino sebagai tempat peristirahatan gubernur Belanda dan Panti Samadi Ratna Miriam sebagai tempat konferensi NIT yang dijaga ketat dari arah barat daya dan selatan pada gerbang masuk wilayah Malino, sedangkan pada arah timur dan timur laut keamanan ditunjukkan adanya bangunan-bangunan militer Kolonial Belanda pada asrama militer Ahmad Yani Malino.

D. Kesimpulan

Bangunan-bangunan kolonial Belanda di Malino merupakan bukti adanya keberadaan dan aktifitas bangsa Belanda di kawasan Malino. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bangunan-bangunan tersebut menggunakan arsitektur kolonial Belanda meskipun penerapannya sangat sederhana dengan bahan bangunan yang seadanya dan beragam, ini terlihat pada bentuk dan elemen-elemen pendukung pada bangunan-bangunan yang ada di Malino, selain itu hanya beberapa elemen bangunan yang berdaptasi terhadap iklim. Gaya dan bentuk arsitektur bangunan-bangunan kolonial Belanda di Malino, menurut studi pustaka dan data lapangan, dapat dikemukakan bahwa bangunan-bangunan tersebut dibangun sekitar tahun 1920-1940an, dimana pada periode tersebut bangunan kolonial

telah mendapat berbagai macam pengaruh arsitektur yang dicampur dari periode-periode sebelumnya.

Sejak masa kerajaan Gowa ke XVI yakni Sultan Hasanuddin, Malino sudah dijadikan sebagai basis pertahanan wilayah timur kerajaan Gowa pada masa lalu yang dulu hanya merupakan daerah pegunungan dengan hutan belantara sehingga sering pula dijadikan sebagai tempat pelarian para buronan Belanda, ini menunjukkan bahwa sejak dahulu wilayah Malino telah dimanfaatkan untuk kepentingan Militer baik dari pihak kerajaan Gowa maupun dari pihak Belanda, sehingga pada masa Belanda berkuasa sepenuhnya di Sulawesi Selatan, kawasan Malino dijadikan tempat peristirahatan bagi para pegawai Pemerintahan Belanda, dan untuk menunjang keamanan didirikanlah bangunan-bangunan Militer. Selain itu penempatan bangunan-bangunan kolonial Belanda di Malino memperlihatkan adanya strategi keamanan militer sebagai tempat peristirahatan bagi orang-orang Belanda, terlebih-lebih pada saat konferensi Malino 1946 diadakan yang bertujuan untuk membentuk Negara Indonesia Timur (NIT), dan tentu harus memiliki keamanan yang ketat untuk kelancaran konferensi tersebut.

Bangunan-bangunan kolonial Belanda di Malino sebagai Cagar Budaya, semestinya harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting dan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah daerah setempat agar dapat memberikan perhatian lebih banyak bagi bangunan-bangunan yang memiliki makna kesejarahan khususnya di Malino.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Novida. 2006. *Warna Eropa dalam Wajah Kota*. Dalam Rr. Triwurjani, dkk. Permukiman di Indonesia: Perspektif Arkeologi. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Ching, F.D.K. 1996. *Ilustrasi Desain Interior*. Jakarta: Erlangga.
- Daryanto. 2001. *Kumpulan Gambar Teknik Bangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Pancawati. 2005. *Peran Perapian dalam Membentuk Ruang Baru di Sasak*. Surabaya: Dimensi Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik Arsitektur, Fak. Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra.
- Fagan, Brian M. 1994. *In The Beginning*. New York: The limbriar Corporation.
- Fitry, Isnen. 2006. *Kopendium Sejarah Arsitektur Indonesia dan Asia: India, Cina, dan Jepang*. Medan: Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.
- Funari, P.P.A, dan Andres Zarankin. 2003. *Social Archaeology of Hausing from a Latin American Perspective*. Journal of Social Archaeology 3. Sage Publication.
- Fauzy, Bachtiar, dkk. 2013. *Sintesis Langgam Arsitektur Kolonial Pada Gedung Restoran "Hallo Surabaya" di Surabaya*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan.
- Hamid, Pananrangi. 1990. *Sejarah Daerah Gowa*. Ujung Pandang: Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Hadinoto. 1999. "Arsitektur Kolonial Belanda" dalam *Monument dan Situs-situs di Indonesia*. Bandung: Palapa.
- Hersanti, dkk. 2008. *Tipologi Rancangan Pintu dan Jendela Rumah Tinggal Kolonial Belanda di Kayutangan Malang*. Malang: Jurusan Arsitektur Fak. Teknik, Universitas Brawijaya.
- Juhana. 2001. *Arsitektur dalam Masyarakat: Pengaruh Bentuk Arsitektur dan Iklim Terhadap Kenyamanan Thermal Rumah Tinggal Suku Bajo di Wilayah Pesisir Bajoe Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*. Semarang: Bendera.
- Kulle, Syarifuddin, dkk. 2007. *Gowa Bergolak, Gerakan Rakyat Menentang Penjajah*. Makassar: Pustaka Refleksi

- Lippsmeier, Georg. 1997. *Bangunan Tropis, edisi kedua*. Alih Bahasa oleh Syahmir Nasution. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Oesman, Osrifoel. 1996. Rekonstruksi Bangunan Hunian di Situs Trowulan Pada Masa Majapahit (Suatu Kajian Arsitektur)". Proposal Rancangan Tesis. Jakarta: Program PascaSarjana Universitas Indonesia.
- Pratiwo. 2009. *Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Silaban, F. 1983. *Idealisme Arsitektur dan Kenyataannya di Indonesia*. Menuju Arsitektur Indonesia. Bandung: Alumni.
- Sumalyo, Yulianto. 1993. *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Sumalyo, Yulianto. 1995. *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soekiman, Djoko. 2000. Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukung di Jawa (*abad XVIII – Medio Abad XX*). Dalam Surianti. *Bangunan Pengadilan Negeri Makassar (Suatu Tinjauan Arkeologi)*. Makassar: Jurusan Arkeologi, Universitas Hasanuddin.
- Sukawi dan Dhanoë Iswanto. 2011. *Adaptasi Tampilan Bangunan Indis Akibat Perubahan Fungsi Bangunan, Studi Kasus : Resto Diwang dan De' Joglo Semarang*. Semarang: Jurusan Arsitektur Fak. Teknik, Universitas Diponegoro
- Tika, Zainuddin dan Syam M.R. (Ed). 2007. *Malino Berdarah, Napak Tilas Perjuangan Abd Rauf Dg. Nompo Kr. Parigi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Tika, Zainuddin, dkk. 2013. *Sejarah Tinggimoncong*. Sungguminasa: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.
- Zarankin, Andres. 2005. *Walls of Domestication: Archaeology of the Architecture of Capitalist Elementary Public Schools*. Dalam Pedro Paulo Funari, dkk (Ed). *Global Archaeological Theory: Contextual Voices and Contemporary Thoughts*. Newyork: Kluwer Academic.

KONSEPSI KONSERVASI PERKOTAAN

Asmunandar

(Staf Pengajar Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNM)

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumberdaya budaya atau *Cultural Resource Management (CRM)* sebagaimana yang dikenal di Amerika Serikat, di beberapa tempat lainnya disebut dengan *Archaeological Heritage Management (ARM)*, adalah sebuah sistem perlindungan, perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan tinggalan budaya masa lampau manusia termasuk lokasi atau tempat dimana tinggalan itu berada. *Cultural Resource Management* dalam pengertian seluas-luasnya disebut arkeologi konservasi yang berbeda dengan arkeologi penelitian atau pengkajian (*Retrieval Archaeology*). Terdapat dua tahap yang prinsipil, yaitu; pertama mengumpulkan sedapat mungkin informasi yang relevan dengan situs dan arealnya; kedua, adalah konservasi situs-situs itu dengan tatacara perlindungan secara wajar (Renfrew dan Bahn, 1991: 470).

Di Amerika Serikat usaha ke arah konservasi mulai dicanangkan pada tahun 1872, yang pada waktu itu sedang mengembangkan sistem pertamanan *Yellowstone National Park*. Sementara perhatian terhadap usaha konservasi semakin besar setelah *The American Association for the Advancement of Science* pada tahun 1873 mengeluarkan sebuah petisi yang ditujukan kepada kongres, yang mencela penggunaan *natural resources* secara tidak bijaksana. Sejak saat itulah pemerintah Amerika Serikat mulai menyusun banyak perundangan yang berhubungan konservasi. Berturut-turut, tahun 1891 dikeluarkan undang-undang pengaturan hutan yang disebut *Forest Reserve Act*, undang-undang yang mengatur tentang pemanfaatan air, *The Reclamation Act* tahun 1902 dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan monumen-monumen nasional dan objek-objek benda antik di tahun 1906 (Subroto, 1995: 2).

Di Australia peninggalan dan tempatnya berada dilindungi dengan perundangan yang disebut dengan *Burra Charter* (Piagam Burra). Piagam ini mengacu pada *ICOMOS (International Council of Monument and Sites)*, yang dijalankan di bawah sebuah lembaga bernama *The Australian Heritage Commission* (Pearson dan Sullivan, 1995: 13).

Gerakan arkeologi yang titik perhatiannya pada konservasi, dimulai sekitar tiga dasawarsa yang lalu dan merupakan imbas dari gerakan pelestarian lingkungan hidup yang

marak pada waktu itu. Pakar arkeologi menyadari bahwa warisan budaya adalah sumberdaya yang tidak dapat di perbaharui (*unrenewable*) dan merupakan milik masyarakat luas. Dalam pergolakan ini semua kegiatan yang berkaitan dengan warisan budaya, baik penelitian, pelestarian dan pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas (McGimsey dan Davis, 1977; Mcleod, 1977; Cleere, 1989; dalam Tanudirjo, 1998: 3-7).

Gerakan arkeologi konservasi melahirkan konsep arkeologi publik (*public archaeology*), arkeologi kontrak (*contract archaeology*), arkeologi penyelamatan (*salvage/rescue archaeology*) atau yang lazim disebut pengelolaan sumberdaya budaya (*cultural resource management*). Issu yang digarap oleh gerakan ini adalah bahwa benda-benda warisan budaya haruslah diselamatkan dari kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kemusnahan sumberdaya, termasuk penelitian arkeologi yang semena-mena. Gerakan ini mendesak para pakar arkeologi agar bekerja dengan bertanggung jawab dan didasari wawasan penyelamatan sumberdaya budaya untuk pemanfaatan jangka panjang (Sharer dan Ashmore, 1979: 552-554).

Sumberdaya budaya menurut Cleere 1989, adalah aset yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik untuk kepentingan idiologis, akademis maupun untuk kepentingan yang bersifat ekonomis (Cleere, 1989: 5-10). Dalam hubungan ini maka sumberdaya budaya, khususnya sumberdaya materi, yang selanjutnya disebut sumberdaya arkeologi (SDA) perlu mendapat penanganan (pengelolaan) secara tepat, sesuai dengan jenis dan kondisi keberadaannya.

Kegiatan tersebut dimaksudkan agar aset dapat terjaga dan terlindungi kelestariannya. Berkenaan dengan pengelolaan, diperlukan bentuk dan jenis pengelolaan yang merujuk langsung pada kepentingan perlindungan dan pelestarian terhadap sumberdaya arkeologis. Hal itu diperlukan untuk tetap mempertahankan keberadaan situs yang merupakan sumber data utama bagi kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta kepentingan penelitian arkeologi pada khususnya. Selain itu, dengan tetap lestariannya peninggalan budaya tersebut maka dapat tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat umum.

Renfrew dan Bahn (1991) mengemukakan tentang pengelolaan sumberdaya arkeologis meliputi:

“The safeguarding of the archaeological heritage through the protection of sites and through salvage archaeology (rescue archaeology), generally within the

framework of legislation designed to safeguard the past" (Renfrew dan Bahn, 1991: 486).

Kegiatan pengelolaan terhadap sumberdaya budaya, khususnya yang berkaitan dengan budaya materi (sumberdaya arkeologi), telah dilaksanakan oleh beberapa negara seperti Denmark, Israel, Amerika Serikat, Australia, Cina dan Jepang (Renfrew dan Bahn, 1991: 463-486).

Hal yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengelolaan dan pengembangan serta pemanfaatan objek sejarah dan arkeologi baik situs, kawasan serta lingkungannya, adalah usaha proteksi atau perlindungan dengan menerapkan suatu mekanisme yang disebut dengan *zoning* (pemintakatan). Gagasan tentang zonasi sebenarnya diperuntukkan untuk mengontrol dan mengatur penggunaan tanah atau lahan bagi pembangunan di masa yang akan datang. Sebagaimana dikemukakan oleh Callcott (1989) bahwa:

"Zoning is a tool that provides a local government with a basic framework for land-use control and regulating future development. The power to zone is provided by each state through enabling to its municipalities. Since zoning is one of the basic factors that affect property uses, and its building, varying applications of this technique must be understood by those interested in rural conservation" (Callcott, 1989: 16).

Konsep tersebut dipakai untuk melindungi dan mengatur dalam upaya pelestarian objek sejarah dan arkeologi dan nilai-nilai yang dikandungnya serta keaslian lingkungan masa lalu.

SEJARAH KONSERVASI DI INDONESIA

Di Indonesia, Upaya penanganan terhadap sumberdaya arkeologi, telah dilakukan sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda. Permasalahan warisan budaya telah menjadi perhatian sejak awal abad 20, yang dilakukan dengan cara inventarisasi, deskripsi, dokumentasi, restorasi, preservasi, konservasi dan rekonstruksi dengan maksud menyelamatkan benda-benda arkeologi dari kehancuran, hilang atau sebab-sebab lain, serta dalam usaha pemanfaatan sumberdaya arkeologis tersebut.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh suatu badan berbentuk kepanitiaan bernama *Commissie in Nederlandsch Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* tahun 1901. Kemudian berganti menjadi *Oudheidkundig Dienst* (Jawatan Purbakala) tahun 1913.

Sementara secara operasional pada tahun 1931 dikeluarkan *Monumenten Ordonantie Staatblad* Nomor 238 yang mengatur tentang perlindungan dan penanganan peninggalan sejarah dan purbakala dalam wilayah Hindia Belanda. Perangkat hukum ini dianggap tidak memadai, dan oleh pemerintah Indonesia menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Pada tahun 2010 undang-undang tersebut berubah menjadi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 yang lebih mengapresiasi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya.

Pemikiran pengelolaan sumberdaya arkeologi di Indonesia digaungkan pada tahun 1980-an yang dirintis oleh para akademisi dan para peneliti arkeologi, sebagai tanggapan serius dari isu internasional. Isu tersebut diantaranya adalah sumberdaya arkeologi bersifat rapuh, sangat terbatas, tidak dapat diperbaharui, kontekstual dan terancam oleh pembangunan yang berkelanjutan serta sumberdaya arkeologi yang merupakan milik bersama masyarakat. Di sisi lain bahwa Indonesia adalah wilayah yang memiliki sumberdaya budaya yang sangat banyak dan beragam. Pusat-pusat sumberdaya arkeologi di Indonesia tersebar di hampir seluruh pulau sehingga membutuhkan penanganan serius dan terpadu.

KONSEPSI KONSERVASI PERKOTAAN

Menurut Danisworo, bahwa bentuk kota sebagaimana yang ada sekarang, merupakan hasil dari proses yang panjang dan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh manusia dalam periode yang panjang. Sebagai contoh adalah Kota Jakarta yang merupakan produk dari berbagai macam keputusan yang diambil baik oleh pemerintah, kelompok masyarakat atau individu selama lebih dari beberapa ratus tahun. Dengan kata lain bentuk fisik sebuah kota yang terlihat sekarang adalah akumulasi dari kekuatan dasar yang tidak dapat dirasakan atau ditemukan dalam aturan-aturan atau nilai sekarang ini ketika dia terbentuk. Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota adalah proses yang kontinyu dan memiliki hubungan sangat dekat terhadap evolusi peradaban dan kebudayaan manusia penghuninya. Kita harus cukup sensitif untuk merasa dan melihat hubungan antara kekuatan yang tidak dirasakan itu dan bentuk dan tataletak fisik kota itu.

Pertumbuhan sebuah kota tidak lepas dari peradaban manusia dan evolusi kebudayaan yang menuntut area yang cukup bagi kontinuitas manusianya, menuju kepada

perbaikan dan pembenahan perangkat kehidupan yang lebih canggih. Demikian pula bahwa pertambahan jumlah penduduk kota selalu mendorong bertambahnya populasi yang selalu disertai dengan pertambahan yang sesuai dengan kebutuhan dan memadainya pelayanan publik. Kesemua itu turut mempengaruhi secara langsung dalam proses degradasi lingkungan di dalam kota, yang berefek pada kerusakan. Sementara tanah adalah lahan bagi penduduk kota yang sangat strategis dalam arti ekonomi.

Untuk itu, guna mempertahankan perwajahan kota lama, diperlukan kegiatan preservasi untuk memunculkan citra sebuah kota yang bersejarah. Dalam konsep akademis, preservasi merupakan sebuah usaha melindungi dan menyelamatkan bangunan atau monument termasuk lingkungannya dalam kondisi sekarang dan mencegahnya dari proses kerusakan secara terus menerus. Langkah tersebut dilakukan sesuai aturan untuk melindungi, gedung-gedung, bangunan (monumen) dan atau lingkungan atau area yang memiliki arti sejarah atau nilai arsitektural, dari unsur-unsur yang berpotensi merusak. Preservasi sangat bergantung pada kondisi sebuah bangunan dan lokasi yang akan dipreservasi. Usaha preservasi tersebut termasuk pula gentrifikasi, restorasi, rehabilitasi, konservasi, renovasi dan atau rekonstruksi.

Dalam proses perencanaan kota digunakan beberapa metode pendekatan yang telah dikenal dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi atau sifat persoalan yang dihadapi. Ada beberapa rutinitas yang sangat panjang yang dipraktekkan di beberapa negara yang berhubungan dengan pertanyaan preservasi antara lain:

1. Gentrifikasi (*Gentrification*)

Gentrifikasi adalah mencoba untuk menghidupkan sebuah kota yang berarti menambah kualitas lingkungan, tetapi tanpa ada kreasi yang penting terhadap perubahan struktur dalam area tersebut. Sasaran gentrifikasi adalah memperbaiki kehidupan ekonomi khususnya area yang menyandarkan diri pada kekuatan pasar, membuat variasi fasilitas dan pelayanan publik, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan melalui program rehabilitasi/renovasi tanpa ada sesuatu apapun pekerjaan yang merusak. Contohnya, peroyek perbaikan *kampung* dan lingkungan dapat ditempatkan dalam kategori ini. Perbaikan tersebut difokuskan pada perbaikan berbagai infrastruktur pelayanan yang masih tetap digunakan namun perubahan struktur lingkungan yang telah ada dilakukan seminimal mungkin.

2. Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Pada dasarnya rehabilitasi adalah berusaha untuk mencoba memperbaiki/memulihkan kondisi sebuah bangunan atau bagian-bagian dari area kota yang rusak, atau pemulihan area menuju kepada kondisi yang asli, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Metode tersebut banyak digunakan dalam proses gentrifikasi dan konservasi gedung-gedung dan lingkungannya. Contoh perbaikan pada bagian-bagian bangunan yang rusak agar dapat digunakan secara pantas sesuai tujuan penggunaannya. Selain itu juga dilakukan perbaikan jalan, pembersihan saluran air dan saluran pembuangan agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.

3. Konservasi (*Conservation*)

Pada dasarnya konservasi mencoba melakukan pemeliharaan khususnya tempat atau lokasi, yang maksudnya agar dapat dipertahankan sesuai dengan konsep awalnya. Tempat tersebut dapat berupa tanah, area, gedung atau klompok bangunan termasuk lingkungannya. Sementara yang harus diperhatikan adalah: sejarah, budaya, atau nilai-nilai tradisional, nilai keagungan, iklim, lokasi geografis, fungsi sosial ekonomi dan aspek penting lainnya. Hal tersebut dilihat dari aspek dan arti awal, kepentingan sekarang dan kepentingan di waktu yang akan datang. Dengan demikian konservasi mencoba memelihara, melindungi dan dapat digunakan secara efisien sebagai tempat khusus.

4. Renovasi (*Renovation*)

Renovasi adalah mengganti bagian-bagian atau hampir seluruh bagian gedung tua, khususnya bagian interior dengan maksud mengadaptasi gedung tersebut untuk tujuan penggunaan baru, atau untuk tetap pada fungsi sebelumnya atau difungsikan dengan konsep modern atau sesuai dengan kondisi yang ada. Langkah tersebut diajukan untuk dicoba mengkonservasi dan gentrifikasi gedung atau lingkungan. Contoh, perubahan fungsi yang terjadi dari rumah tinggal ke penggunaan komersil seperti beberapa rumah Kota Bandung yang direnovasi dan disesuaikan atau diadaptasi ke fungsi-fungsi yang baru.

5. Restorasi (*Restoration*)

Restorasi dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi semula dengan memulai membersihkan dari segala tumbuh-tumbuhan yang bertumpuk, dan dengan memasang kembali

bagian-bagian yang asli yang telah hilang tetapi tanpa tambahan apapun bagian yang baru. Contoh, perbaikan stupa besar Candi Borobudur di Jawa Tengah.

6. Rekonstruksi (*Reconstruction*)

Rekonstruksi merupakan upaya yang mencoba mengembalikan ke kondisi asli atau membangun kembali sebuah tempat yang memungkinkan kelihatan asli sejauh yang diketahui. Proses rekonstruksi biasanya diperuntukkan pula untuk kebutuhan tempat rekreasi yang dapat merusak atau dianggap merusak sama sekali. Contoh, rekonstruksi reruntuhan sebuah kota kuno di Kesultanan Banten yang telah hancur tetapi peninggalan dan bagian-bagiannya masih dapat dijadikan dasar untuk rekonstruksi.

Secara umum kegiatan preservasi tersebut telah termaktub dalam regulasi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, utamanya pada pasal 1 yang menjelaskan mengenai kegiatan pengelolaan, pelestarian, perlindungan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan pemanfaatan. Hanya saja langkah langkah konkret kegiatan-kegiatan tersebut belum sepenuhnya dijelaskan sehingga konsepsi akademis mengenai konservasi perkotaan, khususnya kota bersejarah dapat menjadi unsur pendukung dan pelengkap dalam upaya-upaya konservasi kota dalam kerangka merevitalisasi kawasan kota.

Preservasi Sebagai Proses Peremajaan Kota

Pekerjaan preservasi dihubungkan dengan proses peremajaan kota. Kebijakan peremajaan sebuah kota pada dasarnya atau mulanya adalah sebagai berikut; (a) tingkat persoalan yang dihadapi; (b) potensi; dan (c) prospek terhadap bagian atau lokalitas yang dimiliki untuk masa depan. Hasil dari studi dari tiga faktor di atas, akan sangat berpengaruh terhadap jenis kebijakan dan juga implementasi terhadap peremajaan dalam sebuah kota. Sebagai contoh, kepentingan melakukan peremajaan keseluruhan atau dalam bagian-bagian, atau hanya sekedar memanfaatkan asset potensi sejarah untuk kembali mengeksiskannya secara utuh.

Perubahan struktur kota sebagai hasil kebijakan rekonstruksi sesungguhnya sangat besar. Tergantung pada tingkatan level masalahnya, perubahan yang terjadi terhadap lokasi struktur mungkin dalam sifat fisiknya, sifat fungsi, sifat sosial atau kombinasi dari ketiganya.

Kemudian, dalam garis-garis besar konsep preservasi pada lingkungan kota harusnya melihat pada proses yang ada di atas, dan bukan sebagai hasil akhir.

Dalam pencapaian formula kebijakan preservasi, dalam konteks peremajaan, yang terpenting harus diberikan bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan implementasi metode, tetapi harus lebih langsung kepada persoalan tentang bagaimana memanfaatkan asset sumberdaya sejarah dengan baik dan apa tujuan dari peremajaan hingga yang berhubungan dengan masyarakat umum. Apa yang diharapkan melalui proses peremajaan tersebut tergantung pada keadaan tempat, yang pada dasarnya termasuk dalam tiga poin utama yakni; (1) memperkenalkan 'kehidupan' yang baru; (2) memperbaiki kemampuan yang ada; dan (3) menghidupkan kembali 'kehidupan' yang telah berhenti agar tetap hidup.

PENUTUP

Studi tentang pengelolaan sumberdaya arkeologis tidak terlepas dari adanya kekhawatiran oleh para pakar arkeologi yang menaruh minat pada masalah kelangkaan data arkeologis dan manfaatnya. Pandangan seperti itu tidak semata-mata bermaksud memposisikan kepentingan arkeologi sebagai *superior* daripada kepentingan lainnya. Namun kenyataan menunjukkan di berbagai tempat di Indonesia terjadi kerusakan objek-objek arkeologis, baik disengaja maupun tidak, berhubung sebagian besar situs dan peninggalan yang dikandungnya tidak terjaga dengan baik.

Kenyataan menunjukkan bahwa tinggalan arkeologis tidak hanya berupa benda yang dapat dipindahtempatkan (*moveable*) tetapi juga dapat berupa bangunan (*fitur*), atau jejak-jejak lain yang melekat permanen (*unmoveable*) pada suatu media seperti lukisan di gua prasejarah serta benda-benda lainnya yang menjadi satu kesatuan budaya. Tinggalan tersebut diperlukan untuk kepentingan pelestarian dan penelitian arkeologi, serta sebagai sumber informasi pengetahuan. Potensi budaya "mati" ini secara teknis dapat dikelola dengan berbagai pendekatan dengan maksud-maksud akademik, pelestarian, penelitian, pariwisata serta sebagai sarana pencitraan kebudayaan bangsa Indonesia.

Salah satu pengertian pengelolaan sumberdaya arkeologis di sini, adalah bagaimana mengelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan tidak saling berbenturan dengan kepentingan lain yang ada terhadap sumberdaya arkeologis. Pengertian ini bermakna

bahwa mengabaikan sumberdaya arkeologi sebagai akses penting pembangunan identitas dan jatidiri nasional adalah tindakan yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Callcott, Stephen Law 1984 *Approaches to Archaeological Heritage, New Directions in Archaeology*. New York: Cambridge University Press.
- Cleere. H.F. (ed.). 1989. *Archaeological Heritage Management in The Modern World*. London: Unwin Hyman.
- Danisworo, Muhammad. 1997. *The Meaning of Preservation and Conservation*. Dalam *Preservation and Conservation of Cultural Heritage in Indonesia*, Eko Budihardjo (ed). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places : The Basic of Heritage Planning, for Managers, Landowners*.
- Renfrew, Colin dan Paul Bahn. 1991. *Archaeology, Theories, Method and Practice*. London: Thames and Hudson Ltd.
- Tanudirjo, Daud Aris. 1998. *Cultural Resources Management sebagai Manajemen Konflik*. Artefak No. 19 Februari 1998.

BAHAN ALAMI SEBAGAI ALTERNATIF PERAWATAN CAGAR BUDAYA

Oleh : Mustafa

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perawatan Cagar Budaya menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena berbagai macam penyakit, sehingga memerlukan perawatan yang sistematis, akurat dan berkesinambungan. Pengembangan metode perawatan berbasis kearifan tradisional sangat penting untuk dilakukan, mengingat hal tersebut adalah warisan generasi terdahulu yang terbentuk melalui proses yang cukup panjang berdasarkan pemikiran, ide-ide dan pencermatan terhadap alam lingkungan, serta pengalaman (empirik). Perawatan secara tradisional lebih aman dibanding perawatan modern yang menggunakan bahan kimia sintetik, selain ramah lingkungan juga dengan mudah diperoleh pada lingkungan sekitar.

Dalam budaya masyarakat nusantara terdapat berbagai bentuk kearifan lokal (local wisdom) dalam hal pemeliharaan cagar budaya. Metode pemeliharaan cagar budaya masih dalam bentuk sederhana atau kebiasaan yang dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi atau kebiasaan tersebut sebagian besar masih dikomunikasikan dalam bahasa lisan atau belum terdokumentasikan, sehingga tradisi atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat nusantara tersebut dikategorikan sebagai pengetahuan pra-saintifik (*prescientifik knowledge*). *Prescientifik knowledge* adalah pengetahuan masyarakat dalam bentuk kebiasaan, tradisi kepercayaan, mitos dan sebagainya dimana pengetahuan tersebut belum dibuktikan keilmiahannya.

Untuk memperoleh metode perawatan yang berbasis kearifan tradisional diperlukan inventarisasi dan praktek yang berkembang di masyarakat hasilnya di analisis untuk ditentukan metode mana yang dapat dikembangkan. Metode ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan yang bersifat pra-saintifik untuk dilakukan saintifikasi lebih lanjut sehingga

metode perawatan yang dikembangkan dari kearifan tradisional dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Perawatan dalam konteks Cagar Budaya sering pula disebut **Konservasi**. Konservasi dalam arti luas adalah merupakan suatu kegiatan perawatan cara pengawetan terhadap cagar budaya yang telah mengalami kerusakan/pelapukan. Perawatan adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah perawatan/konservasi yang berarti pelestarian atau perlindungan. Dengan demikian dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menjaga keberadaan benda secara terus menerus, berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas. Berikut dalam membahas perawatan material cagar budaya cara tradisional dicontohkan bahan seperti kayu, logam dan lain lain serta tehnik pengerjaanya yang masih dipertahankan oleh masyarakat pada umumnya khususnya di Sulawesi Selatan.

I.2 DASAR

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
- Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang perlindungan dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya.

Terkait dengan tindakan dan metode perawatan sangat ditentukan oleh hasil observasi kerusakan, Berikut ini diuraikan kerusakan Benda Cagar Budaya disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Faktor internal

Penyebab kerusakan dari faktor internal meliputi kualitas bahan yang digunakan kelemahan teknologi pembuatan, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan letak /posisi bangunan yaitu sifat tanah dasar lokasi geotopografi dan sebagainya. Benda cagar budaya yang terbuat dari bahan yang kualitasnya rendah akan mudah mengalami kerusakan.

2. Faktor eksternal

Penyebab kerusakan dari faktor eksternal meliputi fisis biologis, kimiawi bencana alam (gempa, tanah longsor, banjir, letusan gunung, dsb) dan faktor manusia (*Vandalisme*) seperti

pencurian coret coret, pukulan dan sebagainya. Suhu dan kelembaban yang tidak menentu dan selalu berubah-ubah setiap saat menyebabkan kondisi benda tidak stabil yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya keretakan, pecah dan melengkung.. Kelembaban yang tinggi membuka peluang tumbuh kembangnya jasad renik (ganggang (*Algae*), lumut (*Moss*), dan jamur) pada permukaan benda. Keberadaan jasad renik tersebut lama-kelamaan dapat menyebabkan kerusakan dan pelapukan benda cagar budayanya sendiri karena pelarutan unsur. Akibat yang ditimbulkan dari pertumbuhan jasad, benda cagar budaya akan mengalami kerapuhan /keropos, berlubang, menyusut, pecah, patah, yang akhirnya terdegradasi yaitu menurunnya kualitas bahan penyusun, serta nilai estetis maupun teknis (kekuatannya) .

Faktor penyebab kerusakan seperti yang dikemukakan di atas, perawatan Benda Cagar Budaya dapat dilakukan dengan cara sederhana dengan menggunakan bahan tradisional, mengacu kepada metode, teknik, serta bahan yang telah digunakan nenek moyang kita dalam merawat Benda Cagar Budayanya, setiap jenis Benda Cagar Budaya dapat berbeda penanganannya, tergantung kebiasaan masing masing daerah .

I.3 BAHAN ALAMI

Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang diantaranya dapat dibudidayakan sebagai tanaman obat dan obat obatan (herbal) yang diantara tanaman tersebut dapat dipakai sebagai bahan alami dalam perawatan cagar budaya seperti jenis logam, kayu dan lain lain . Beberapa bahan alami yang dimaksud dapat diuraikan seperti di bawah ini :

1. Minyak atsirih

Minyak atsiri dari tanaman organik diketahui mengandung senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai bahan baku insektisida. Hal ini berkaitan dengan sifatnya yang mampu membasmi, mengusir dan menghambat *makan hama* . Minyak atsiri secara umum adalah minyak yang diperoleh dengan cara distilasi, ekstraksi, dan enflorasi dari bagian tanaman : akar, batang, kulit, daun, bunga dan buah. Dibawah ini dapat ditampilkan tanaman penghasil minyak atsirih dengan mudah dapat dipisahkan menjadi komponen yang secara kimia maupun fisika dapat merupakan bahan dasar untuk dikonversi menjadi produk lain seperti minyak sereh, minyak daun cengkeh dan minyak permen. Analisis senyawa aktif dalam minyak atsirih dapat

dilakukan dengan menggunakan alat kromatografi dan spektrometri. Berikut ini beberapa tanaman penghasil minyak atsiri :

Tabel 1. Tanaman penghasil minyak atsiri yang umum dibudidayakan

No.	Tanaman	Bagian Tanaman	Komponen Utama
1	Pohon Cengkeh	Bunga/ daun	Eugenol
2	Pohon Lawang	Kulit	Eugenol dan Safrol
3	Pohon Pinus	Kulit/ batang/ getah	Alfa-pinen
4	Pohon Cendana	Kulit batang/ akar	Santanol
5	Pohon Kayu Putih	Daun	Smeol
6	Pohon Kenanga	Bunga	Ester
7	Pohon Kayu Manis	Kulit/ batang	Sinamil aldehida
8	Sereh	Daun	Sitronelal, sitronelol
9	Nilam	Daun	Patchouli alkohol
10	Methaarvensis	Daun	Menthol
11	Akar wangi	Akar	Vetiverol
12	Adas	Biji	Anetol, estragol, fenson
13	Gondoporo	Daun	Metil salisilat

Beberapa jenis pestisida berbasis minyak atsiri telah diproduksi dan sering digunakan untuk mengendalikan patogen , serangga hama dan vector patogen di lingkungan rumah, rumah kaca , dan peternakan .

➤ **Aktivitas Minyak Atsiri sebagai Antibakteri dan Antijamur**

Aktifitas biologi minyak atsiri terhadap mikroba telah banyak diteliti terutama terhadap bakteri patogen pada manusia dan hewan . hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa sejumlah minyak atsiri mempunyai aktifitas terhadap jamur .Aktifitas anti jamur yang dimiliki minyak atsiri juga berhubungan dengan senyawa monoterfenik fenol khususnya timol,karvakrol dan eugenol (isman,2000)

➤ **Aktivitas Minyak Atsiri Sebagai Antivirus, Antinematoda dan Antigulma.**

Sejumlah minyak atsiri juga dapat menghambat infeksi dari virus(Koul *et al* 2008; Reichling,2009), Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri juga efektif terhadap virus patogen pada tanaman .selain aktivitasnya terhadap mikroba sejumlah minyak atsiri juga berpotensi digunakan sebagai herbisida.(Btish *et al.*,2008; isman, 2000, zanellato *et al.*, 2009)

➤ Aktivitas Biologi Minyak Atsiri Terhadap Serangga

Menurut Dubey *et al.* (2008), Dubey *et al.* (2010), Isman (2000) dan Koul *et al.* (2008), aktivitas biologi minyak atsiri terhadap serangga dapat bersifat menolak (*repellent*), menarik (*attractant*), racun kontak (*toxic*), racun pernafasan (*fumigant*), mengurangi nafsu makan (*antifeedant*), menghambat peletakan telur (*oviposition deterrent*) menghambat pertumbuhan, menurunkan fertilitas, serta sebagai anti serangga vektor. Hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut di atas menunjukkan bahwa sejumlah minyak atsiri mempunyai aktifitas biologi yang berspektrum sangat luas baik terhadap mikroba (bakteri, jamur, virus, nematoda) maupun terhadap serangga hama dan vektor patogen yang hidup disekitar rumah serta serangga hama tanaman.

Sebagai kesimpulan bahwa minyak atsiri dapat digunakan sebagai bahan alternatif pestisida alami atau nabati untuk perawatan benda cagar budaya hal ini disebabkan karena mengandung senyawa benzene dan gugus hidroksi. Beberapa minyak atsiri seperti cengkeh, serih, jahe dan nilam mempunyai sifat sebagai anti bakteri, anti jamur antivirus, antinematoda, anti serangga dan anti gulma. Pestisida berbasis minyak atsiri dinyatakan telah lolos registrasi dari EPA (*Environmental Protection Agency*) dan dinyatakan aman dari GRAS (*Generally Recognized as Safe*) sehingga ramah terhadap manusia dan lingkungan.

1.4 Jenis-Jenis Bahan Alami Yang Dapat Digunakan Dalam Perawatan Cagar Budaya

Tabel.2 jenis bahan alami

No.	Nama Bahan	Khasiat	Keterangan
1	Ramuan tembakau dan cengkeh	Pembersih permukaan kayu	Dasar : Warisan/ Penelitian
2	Jeruk nipis, nanas	Pembersih karat	Dasar : Warisan
3	Air kelapa, nira kelapa	Pembersih karat	Dasar : Warisan
4	Daun sirsak + Kulit kayu tamate + Kulit kayu coppeng	Pengawet kayu	Dasar : Warisan
5	Air payau	Pengawet bambu	Dasar : Warisan
6	Ancur/parakukkulu (bahasa:lokal)	Perekat kayu/rekonstruksi pecahan keramik	Dasar : Warisan
7	Asam jawa	Pembersih kuningan	Dasar : Warisan
8	Blimbing wuluh	Pembersih kuningan	Dasar : Warisan

II. PERAWATAN

Berikut ini akan dipaparkan tentang beberapa metode perawatan secara tradisional yang dapat dilakukan melalui penelusuran sumber data, seperti wawancara, observasi, di beberapa daerah yang dianggap mempunyai kearifan lokal yang berhubungan dengan perawatan alami serta metode pelaksanaannya. Hal tersebut dianggap perlu mengingat setiap daerah mempunyai metode atau tata cara yang berbeda, sehingga membutuhkan kajian lebih dalam. Keseragaman dan sistematika perawatan merupakan hal yang mutlak untuk diterapkan, agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat merusak objeknya .

II.1. Perawatan Material kayu

Permasalahan adalah jamur kerak dan jamur benang yang menempel pada permukaan kayu.

Metode : 1

Membersihkan dengan bahan tembakau dan cengkeh.

Prosedur kerja :

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Bahan tembakau dan cengkeh direndam dengan air biasa hingga waktu 24 jam, dan dipastikan bahan tembakau dan cengkeh larut dalam air
- Air rendaman tembakau dan cengkeh dipisahkan dari ampasnya
- Air rendaman tembakau dan cengkeh dioleskan pada permukaan kayu yang ditumbuhi jamur dengan kuas halus
- Lakukan penyemprotan dengan spreyer secara merata, dilakukan secara berulang
- Lakukan pengolesan dengan menggunakan kuas
- Dibiarkan sampai 24 jam
- Amati dan lakukan secara berulang
- Bersihkan dengan kain

Metode : 2

Pembersihan dengan bahan daun sirsak, kulit pohon nama lokal : pohon tammate dan kulit kayu Coppeng (zizigium)



Foto.1 Bahan pengawet kayu

Prosedur kerja :

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
Merebus daun sirsak + kulit kayu tamate (nama lokal) + kulit coppeng (zizigium)
- Diamkan hingga air rebusan menjadi dingin.
- Oleskan larutan pada permukaan kayu dengan kuas atau lap .

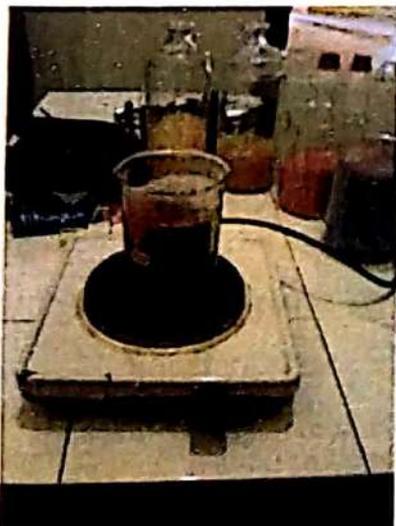


Foto. 2 Perebusan ketiga bahan

- Biarkan hingga mengering.
- Amati secara saksama jamur yang telah dibasmi, lakukan secara berulang bila dibutuhkan

Metode 3

Permasalahan adalah retakan kayu atau patahan dan rekonstruksi pecahan keramik

Bahan : ancor (nama lokal : parakukkulu)

Prosedur kerja

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Bahan ancor ditambah dengan air secukupnya kemudian dimasak hingga mengental.
- Mengoleskan bahan ancor yang telah dimasak pada kedua sisi patahan atau pecahan sampai merata.
- Merekatkan pada kedua sisi patahan, diamkan hingga mengering
- Bersihkan sisa-sisa bahan ancor pada kedua sisi patahan
- Selanjutnya disimpan pada rak/tempat yang telah disediakan

II.2 Material bambu

Permasalahan adalah kumbang serangga dan bubuk kayu kering yang menggerogoti material bambu .

Metode :

Bahan pengawetan adalah air payau .

Prosedur kerja :

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Membelah bambu sesuai ukuran dan kebutuhan
- Merendam bambu ke dalam air payau (bambu diikat jadi satu bagian) perendaman selama sebulan
- Mengangkat dan keringkan pada tempat yang telah disediakan di area terbuka.
- Selanjutnya siap untuk di pergunakan .



Foto.3 Hasil Proses perendaman bambu dengan air payau

II.3 Perawatan Material logam.(besi)

Berikut ada beberapa bahan alami yang dapat digunakan dalam perawatan Cagar Budaya bergerak seperti besi, perunggu dan kuningan. Penyakit yang sering terjadi pada material logam berbahan dasar paduan baja + aluminium, umumnya terkorosi, kuningan maupun tembaga terlapisi dengan patina yang terbentuk secara alami dari proses oksidasi benda dan lingkungannya. Perawatan yang menjadi perhatian adalah menghilangkan penyakit (patina aktif) berwarna kebirubiruan dan kristal kristal garam karena dapat merusak bendanya, berbeda dengan patina pasif yang sifatnya melindungi, sehingga aman untuk objek dan tidak perlu untuk dihilangkan.

Metode 1 :

bahan pembersih jeruk nipis

Prosedur kerja :

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Memilih jeruk yang tua dan matang.
- Mengiris jeruk menjadi beberapa bagian
- Memeras air jeruk diatas lempengan badik/keris
- Mengusap air jeruk dengan ibu jari pada permukaan badik atau keris posisi gerakan searah dari pangkal ke ujung badik/ keris
- Mengulangi secara berulang hingga benda bersih dari korosi

- Mengulangi mengusap dengan ibu jari hingga air jeruk kering pada permukaan badik/ keris
- Memasukkan kembali keris/badik kewarangkanya .

Metode 2 :

Bahan pembersih jeruk nipis, serutan bambu petung

Prosedur kerja :

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Memilih jeruk nipis yang tua dan matang
- Mengiris jeruk nipis menjadi beberapa bagian
- Memeras air jeruk nipis diatas lempengan besi/keris
- Mengusap air jeruk dengan ibu jari pada permukaan badik / keris posisi satu arah dari pangkal ke ujung badik atau keris
- Mengulangi secara berulang hingga bersih dari korosi
- Mengulangi mengusap dengan ibu jari hingga air jeruk nipis kering pada permukaan badik / keris.



Foto 4 Persiapan Bahan



Foto.5 Pengolesan dengan jeruk nipis

- Mengusap permukaan badik/keris dengan serutan bambu petung hingga kering.
- Memasukkan kembali keris/badik kewarangkanya

Metode 3 :

bahan pembersih air kelapa

Prosedur kerja :

- Tiriskan dan bersihkan dengan air lalu lap dengan kain halus hingga kering.
- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Memilih buah kelapa muda (warna kulit kelapa masih hijau)
- Air kelapa dituang pada wadah gelas ukur(besarnya gelas ukur sesuai kebutuhan benda keris/badik). Badik/keris direndam selama waktu kontak seminggu hingga korosi terlepas/bersih dari badik atau keris.
- Tiriskan dan bersihkan dengan air lalu lap dengan kain halus hingga kering.
- Memasukkan kembali keris/ badik kewarangkanya.



Sebelum Perendaman



Foto.6 Perendaman dengan Air Kelapa



Setelah Perendaman

Metode 4 :

bahan pembersih air nira kelapa

Prosedur kerja:

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Air nira kelapa dituang pada wadah gelas ukur (besarnya wadah sesuai benda keris/badik)
- Badik/keris direndam selama waktu kontak seminggu hingga korosi terlepas dari badik/keris
- Tiriskan dan bersihkan dengan air lalu lap dengan kain halus hingga kering
- Masukkan kembali badik/keris kewarangkanya

Metode 5 :

bahan pembersih buah maja (nama lokal : bila)

Prosedur kerja:

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Memilih buah maja/bila yang tua
- Buah maja di belah lalu dilubangi pada bagian yang diinginkan
- Tancapkan badik/keris pada daging buah maja/bila selama seminggu hingga korosi terlepas/bersih dari badik / keris
- Setelah proses perendaman pada daging buah maja/bila lalu badik/keris dibilas dengan air bersih dan dilap dengan kain halus hingga kering
- Masukkan kembali keris/badik kewarangkanya.



Foto. 7 Perendaman dengan buah maja

Metode 6 :

bahan pembersih buah nanas

Prosedur kerja :

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Memilih buah nanas yang masih muda
- Buah nanas di kupas kulitnya dan dihaluskan
- Pisahkan ampas nanas dan airnya
- Badik/keris direndam selama kontak waktu 24 jam

- Ulangi hingga bersih dari korosi/karat pada keris
- Bilas dengan air bersih kemudian lap dengan kain halus
- Masukkan Kembali keris/badik kewarangkanya
-

II.4 Material logam (perunggu)

Permasalahan yaitu akumulasi debu dan lapisan patina aktif yang menempel pada perunggu/kuningan

Metode:

Bahan pembersih Belimbing Wuluh

Prosedur kerja :

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Belimbing wuluh di potong menjadi beberapa bagian
- Belimbing wuluh yang telah dipotong menjadi beberapa bagian digosokkan pada permukaan benda hingga patina aktif dan akumulasi debu yang menempel bersih
- Lakukan secara berulang hingga bendanya dipastikan menjadi bersih
- Bilas dengan air lalu lap dengan kain halus hingga kering
- Simpan pada rak/tempat yang telah disediakan



Foto 8 Belimbing Wuluh



Sebelum dibersihkan



Setelah dibersihkan

- Ulangi hingga bersih dari korosi/karat pada keris
- Bilas dengan air bersih kemudian lap dengan kain halus
- Masukkan Kembali keris/badik kewarangkanya
-

II.4 Material logam (perunggu)

Permasalahan yaitu akumulasi debu dan lapisan patina aktif yang menempel pada perunggu/kuningan

Metode:

Bahan pembersih Belimbing Wuluh

Prosedur kerja :

- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Belimbing wuluh di potong menjadi beberapa bagian
- Belimbing wuluh yang telah dipotong menjadi beberapa bagian digosokkan pada permukaan benda hingga patina aktif dan akumulasi debu yang menempel bersih
- Lakukan secara berulang hingga bendanya dipastikan menjadi bersih
- Bilas dengan air lalu lap dengan kain halus hingga kering
- Simpan pada rak/tempat yang telah disediakan



Foto 8 Belimbing Wuluh



Sebelum dibersihkan



Setelah dibersihkan

II.5 Material logam (Kuningan)

Permasalahan yaitu akumulasi debu dan lapisan patina aktif yang menempel pada permukaan benda

Metode 1

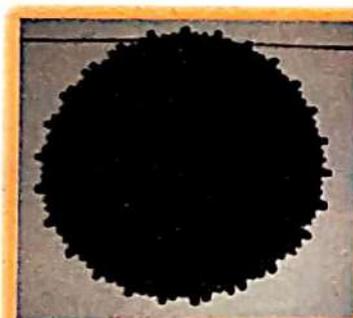
Bahan pembersih asam jawa

Prosedur Kerja :

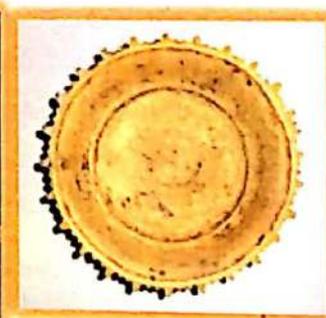
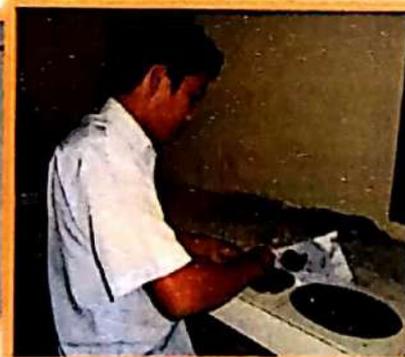
- Mempersiapkan bahan dan peralatan
- Asam Jawa digosokkan pada permukaan benda, kemudian diberi air secukupnya.
- Perlakuan secara berulang hingga benda tersebut bersih
- Bilas sisa asam jawa dengan air bersih
- Keringkan dan gosok dengan daun pisang kering.



Foto.9 Asam jawa



Sebelum dibersihkan



Setelah dibersihkan

Diharapkan dengan adanya tulisan ini akan menambah wawasan kita, khususnya para konservator untuk dapat menerapkan kearifan tersebut lebih dalam dan akurat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perawatan secara tradisional dengan menggunakan bahan alami juga efektif dan efisien, pada paragraf awal tulisan ini ditampilkan sebagai contoh bahan alami minyak atsiri yang telah diproduksi yang kemudian dikonversi sehingga dapat dipakai dalam berbagai kebutuhan ataupun dipakai sebagai bahan alami perawatan cagar budaya karena minyak atsiri punya senyawa aktif (insektisida) dapat membasmi hama selain bahan yang mudah diperoleh juga harga lebih terjangkau dibanding dengan bahan kimia sintetik.

Perawatan secara tradisional sebagaimana yang telah dilakukan dengan beberapa bahan alami seperti diatas (lihat foto) difokuskan pada benda cagar budaya berbahan logam dan kayu secara langsung, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kajian yang melibatkan beberapa bidang ilmu sehingga dapat menyempurnakan rangkaian aktifitas perawatan tradisional, beberapa bahan alami yang digunakan merupakan hasil kajian, telah diuji dan dipraktekkan.

Harapan kami agar dapat dipatenkan/pembakuan tentang penggunaan bahan alami dan metode pelaksanaannya dapat dibuat melalui buku petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS), sehingga akan menjadi acuan atau referensi, dalam kegiatan perawatan cagar budaya bergerak semoga bermanfaat bagi pelestarian cagar budaya dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Anonim , 2011; Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Kementerian Kebudayaan Pariwisata
- Anonim ,2005 ; Pedoman Perawatan dan Pemugaran Benda Cagar Budaya Bahan Batu
- Aris Munandar, 2014;Penerapan Metode (Bahan) Tradisional untuk Konservasi Benda Cagar Budaya
- Rianto Ph.d 2014; Minyak Atsiri Sebagai Bahan Aktif Konservasi Benda Cagar Budaya, Makala Workshop Konservasi Cagar Budaya Berbasis Kearifan Tradisional
- Sadirin, 1997 ; Tehnik Konservasi Benda Cagar Budaya di Musium

Semakin besar kunjungan wisata di suatu daerah, maka peluang masyarakat untuk memperoleh keuntungan semakin besar pula. Inilah letak hubungan antara pariwisata, pengembangan ekonomi dan kebudayaan. Satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga menimbulkan dampak yang seimbang.

Peranan pemerintah dalam pengembangan pariwisata harus mampu memberikan kerangka kerja strategis untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur, penyediaan berbagai bentuk fasilitas, koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta termasuk pengaturan dan promosi.

Berdasarkan kesimpulan World Tourism Conference di Manila tahun 1980 (Soemardjan, 1987:133), mengingat bahwa dalam pengembangan pariwisata harus mempelajari turisme secara menyeluruh, berhati-hati secara objektif. Dalam pengembangannya, pemerintah harus menitikberatkan pada peranan pariwisata terhadap kesejahteraan sosial, penggunaan tanah, perlindungan terhadap lingkungan sosial dan alam, serta pelestarian tradisi dan kebudayaan. Secara keseluruhan pengembangan pariwisata menyangkut segala aspek kehidupan manusia.

Dalam meningkatkan potensi pariwisata, perlu dilakukan pengembangan berbagai potensi yang ada, baik yang terkait dengan potensi alam, budaya maupun masyarakat dengan berbagai kekhasan yang ada. Termasuk didalamnya mengenai pengembangan semua wilayah di Indonesia. Bali, Yogyakarta dan Toraja sebagai contoh objek wisata yang memiliki ketiga unsur tersebut. Ketika orang membicarakan pariwisata Toraja, akan muncul topik tentang bagaimana alam Toraja, budaya yang ada di Toraja, dan bagaimana masyarakat Toraja akan menjadi kesatuan pembicaraan. Begitu juga ketika orang-orang membicarakan pariwisata Yogyakarta dan Bali. Dalam hal ini, keberhasilan sektor kepariwisataan yang ada di masing-masing wilayah tersebut tidak terlepas dari keterpaduan antara tiga aspek tersebut.

Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang kaya akan potensi pariwisata, baik yang berbasis pada tinggalan arkeologi, alam maupun masyarakat. Akan tetapi hal itu tampak belum tergali secara maksimal bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang dijadikan contoh sebelumnya. Kabupaten Mamasa memiliki potensi alam, budaya dan masyarakat yang cukup menarik untuk dikembangkan sebagai sektor pariwisata, salah satunya adalah Perkampungan Tua Tradisional Balla Peu dan Pemakaman Tedong-tedong Minanga yang terletak disatu wilayah.

Untuk lebih lanjut akan dijabarkan potensi yang ada, berdasarkan potensi alam, budaya dan masyarakat :

Kekayaan Alam

Perjalanan menuju Mamasa, Sulawesi Barat merupakan pengalaman yang cukup menantang dan sekaligus asik untuk ditempuh. Sepanjang perjalanan mata akan tersuguhkan dengan keindahan alam barisan pegunungan, hamparan sawah diantara gunung, sungai berkelok-kelok yang disertai dengan udara sejuk ketika melewati perbatasan antara Polewali Mandar. Meskipun akses perjalanan menuju Mamasa terbilang tidak bagus, namun akan terbayarkan dengan keindahan panorama selama perjalanan.

Beberapa tumbuhan yang mendominasi di pegunungan menuju Mamasa diantaranya, pohon pinus dan tanaman anggrek. Tumbuhan tersebut mencerminkan bahwa kondisi iklim Mamasa dingin, sebab kedua tumbuhan tersebut hanya hidup di wilayah beriklim dingin. Kondisi topografi daerah Mamasa keseluruhannya mencirikan kawasan daratan tinggi atau pegunungan, dimana seluruh wilayah konturnya berbukit-bukit yang juga dikisari beberapa aliran sungai. Sselain itu wilayah Kabupaten Mamasa berada pada ketinggian antara 600 m sampai 2000 m di atas permukaan laut dan ketinggian pegunungan adalah 2500-3107 m di atas permukaan laut. Daerah Kabupaten Mamasa adalah dataran hijau dengan curah hujan yang cukup tinggi, beriklim tropis basah dengan suhu udara minimum 23⁰C dan suhu maksimum rata-rata berkisar 30⁰C.



Foto 1. Pemandangan selama perjalanan menuju Kabupaten Mamasa
Dok. BPCB Makassar, 2012

Potensi Tinggalan Arkeologi

Perkampungan Tua Tradisional Balla Peu

Sebelum membahas lebih lanjut, data arkeologi yang penulis gunakan berasal dari laporan pendataan situs cagar budaya di kabupaten Mamasa Sulawesi Barat tahun 2012 (Anonim, 2012). Perkampungan Tua Tradisional terletak pada ketinggian 1404 meter dari permukaan laut, tepatnya di kampung Balla Peu' Desa Balla Tumuka Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Secara astronomis terletak di S 02° 59' 08,6'' E 119° 17' 43'', berbatasan dengan perbukitan dan persawahan di sebelah utara, barat dan di sebelah selatan, Jalan desa di sebelah timur. Untuk mencapai kampung ini dapat dicapai dengan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat menyusuri jalan kampung dilereng bukit yang masih dalam proses pengerasan dan berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Mamasa.

Terdapat 2 jenis bangunan yaitu Banua sebagai rumah dan alang sebagai tempat menyimpan padi/gabah dengan jumlah 105 buah. Melihat konstruksi bangunan banua dan menurut informasi pemangku adat setempat, banua di Balla Peu terdiri dari 6 tingkatan. Tingkatan banua tersebut didasarkan pada strata sosial masyarakatnya. Terpeliharanya dan lestariannya banua di kampung ini dikarenakan masih ketatnya aturan yang diberlakukan para pemangku adat dan ditaati oleh masyarakatnya untuk tidak membangun rumah selain rumah berbentuk banua. Berikut akan diuraikan masing-masing banua dengan alang yang memiliki orientasi timur-barat secara keseluruhan:

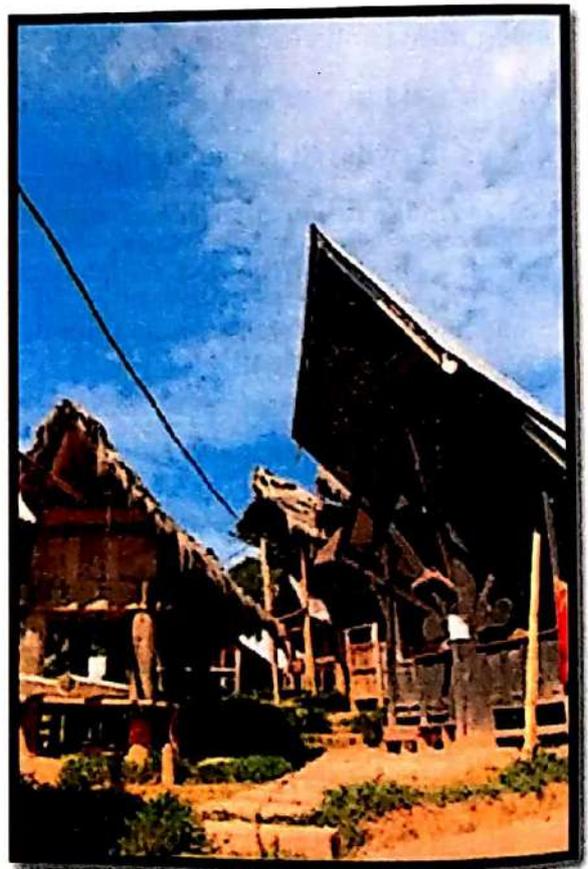


Foto 2. Jajaran Banua di Balla Peu
Dok. BPCB Makassar, 2012

1. Banua Sura

Kata “Sura” berarti “Ukir” jadi “Banua Sura” berarti “Rumah Ukir”, besar dan tinggi namun tidak seperti banua layuk. Penghuni rumah merupakan pemimpin dalam masyarakat yang merupakan golongan bangsawan. Banua Sura merupakan banua tertinggi dalam tingkatan strata masyarakat Balla, dan Banua Sura diperkampungan ini hanya 3 buah. Ketinggian derajat banua ini nampak pada tiang panulak serta dinding yang dipenuhi dengan ragam hias ukiran yang sangat bervariasi berupa ukiran lulung paku, walasigi, pala, matahari, pamaling, bari allo dan to saddang serta ukiran binatang kerbau dan ayam.

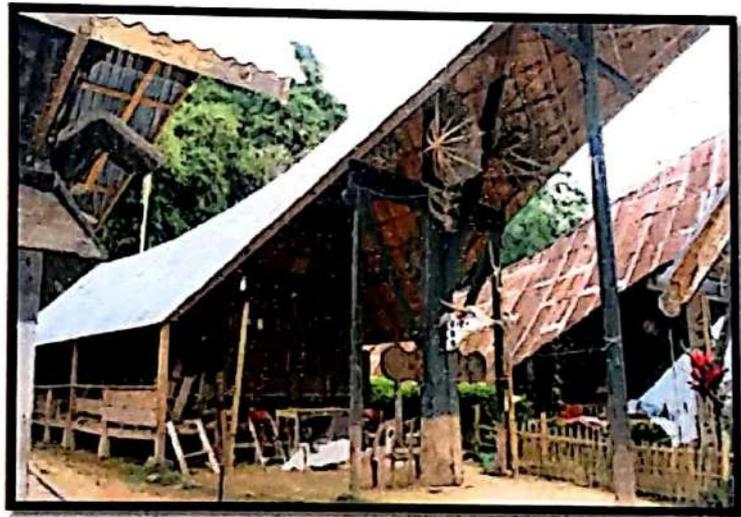


Foto 3. Banua Sura
Dok. BPCB Makassar, 2012

Tiang panulak juga dihias dengan tanduk kerbau serta hiasan kepala kerbau, serta beberapa peralatan upacara lainnya yaitu potongan bambu-bambu kecil dan peralatan musik (gendang). Adanya dua tiang panulak ini merupakan simbol bagi masyarakat mamasa bahwa pemerintahan tidak akan stabil tanpa adanya sekretaris pimpinan. Sehingga pemasangan 2 tiang panulak hanya terdapat pada beberapa buah banua. Banua Sura diperkirakan telah berumur 600 tahun dan pemilik saat ini merupakan generasi ke 21 yang tinggal di banua ini.



Foto 4. Ragam hias pada dinding Banua Sura
Dok. BPCB Makassar, 2012

2. Banua Bolong

Kata “Bolong” berarti “Hitam”, jadi banua bolong berarti rumah hitam. Rumah ini dihuni oleh orang kaya dan pemberani dalam masyarakat. Jumlah banua bolong diperkampungan ini sebanyak 4 buah.

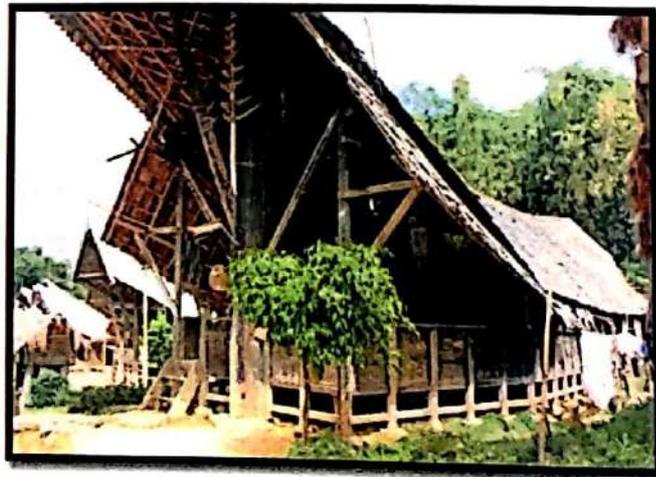


Foto 5. Banua Bolong
Dok. BPCB Makassar, 2012

3. Banua Rapa

Banua Rapa merupakan rumah Mamasa dengan warna asli bahkan tidak diukir dan tidak dihitamkan, penghuninya adalah masyarakat biasa. Banua rapa berjumlah 9 buah berorientasi utara selatan terbuat dari kayu uru, berukuran panjang 7.40 meter, lebar 3,30 meter. Tiang penulak yang berada didepan rumah berukuran tinggi 11 meter, diameter 60 cm yang diberi hiasan kepala kuda dan diberi ukiran motif geometris. Seperti di banua bolong, dibanua rapa pun dihias dengan tanduk kepala kerbau sebanyak pernah melaksanakan upacara adat.

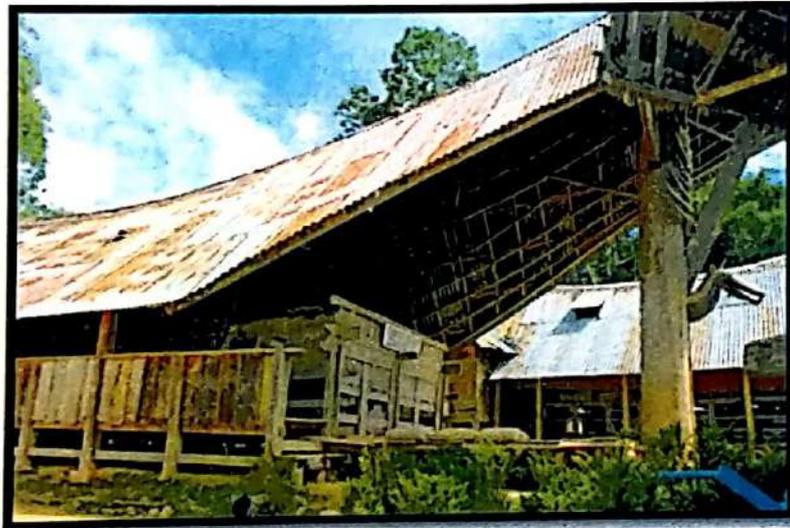


Foto 6. Banua Rapa
Dok. BPCB Makassar, 2012

4. Banua Longkarrin

Banua Longkarrin merupakan salah satu bentuk rumah Mamasa yang bagian tiang paling bawah bersentuhan dengan tanah dialas dengan kayu (longkarrin), dan merupakan rumah untuk masyarakat biasa. Rumah ini diperkirakan dibangun 250 tahun yang lalu dengan ukuran rumah 6,40 meter panjang dan lebar 3,15 meter. Tiang panulak (tiang utama) berupa tiang bulat sederhana tanpa hiasan dan ukiran sama sekali berukuran tinggi 11 meter, serta diameter tiang 19 cm. Jumlah banua longkarring diperkampungan ini sebanyak 64 buah.

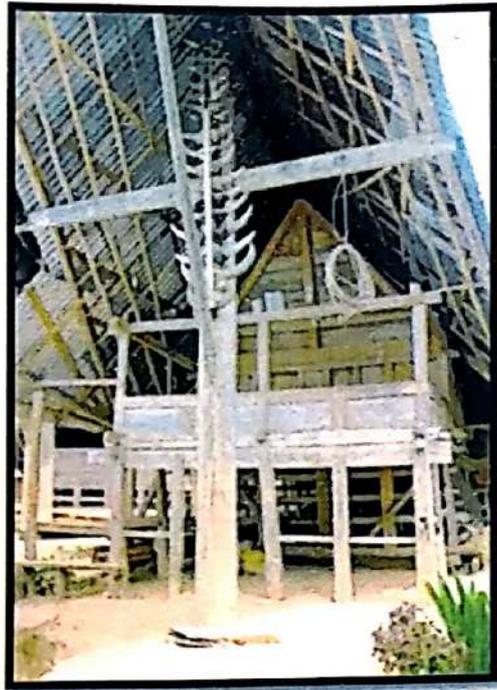


Foto 7. Banua Longkarrin
Dok. BPCB Makassar, 2012

5. Banua Lentong Patondok

Disebut banua lentong patondok karena tiang banua tidak langsung ke tanah tapi bertumpu pada balok kayu dibawahnya. Bangunannya tidak berbeda dengan banua yang lain. Adapun banua berukuran panjang 7,95 meter dan lebar 3,30 meter. Banua Lentong patondok terbuat dari kayu uru dan berjumlah 21 buah diperkampungan ini.



Foto 8. Banua Lentong Patondok
Dok. BPCB Makassar, 2012

6. Banua Pong

Banua pong merupakan rumah hunian untuk golongan masyarakat terendah pada strata sosial masyarakat mamasa. Bangunan rumahnya sangat sederhana bahkan tiang rumahnya hanya berupa balok pipih. Tiang penulak didepan rumah juga sangat sederhana karena tidak mempunyai hiasan sama sekali bahkan diameter tiang hanya 22 cm. Alang yang biasanya selalu ada pada setiap banua, di banua pong alangnya sudah tidak ada lagi.

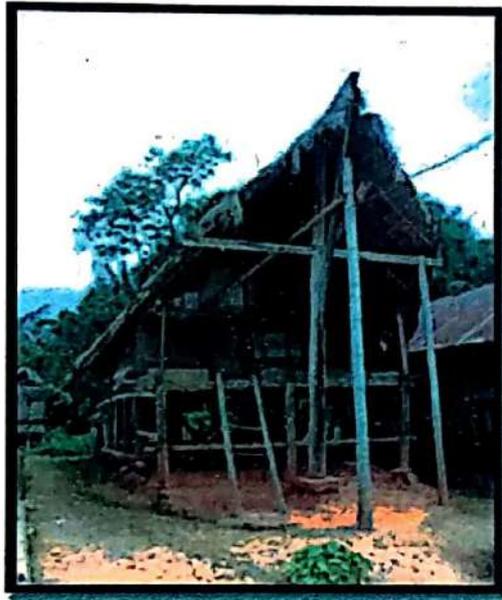


Foto 9. Banua Pong
Dok. BPCB Makassar, 2012

7. Batutu Balla Peu

Secara administratif Batutu Balla Peu masih berada dalam wilayah kampung Balla peu, Desa Balla Tumuka, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa. Letak astronomisnya S 02° 59' 10,3'' E 119° 17' 29,3'' dan berada ditengah-tengah lingkungan persawahan pada ketinggian 1337 meter dari permukaan laut (DPL). Obyek ini berjarak sekitar 1 km dari kampung Balla Peu dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki dengan menyusuri pematang sawah yang berundak. Batutu Balla Peu adalah pemakaman wadah yang berbentuk rumah adat (banua) tanpa pintu dengan ukuran panjang dan lebar berjumlah tiang persegi empat sebanyak 10 buah.

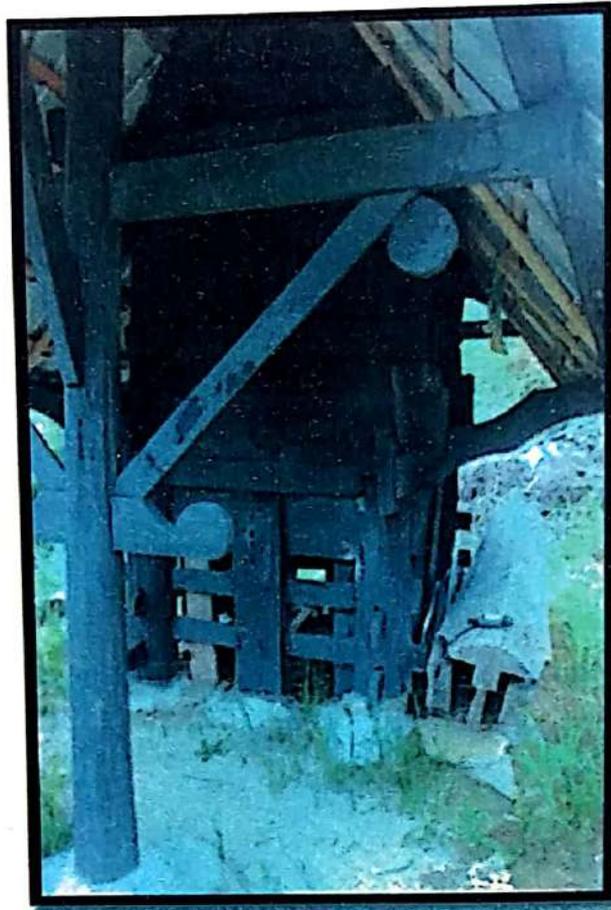


Foto 10. Batutu Balla Peu
Dok. BPCB Makassar, 2012



Foto 11. Sawah adat yang mengelilingi Batutu Balla Peu
Dok. BPCB Makassar, 2012

Masyarakat Perkampungan Tua Tradisional Balla Peu

Masyarakat Balla Peu merupakan kelompok masyarakat yang membentuk perkampungan tua dengan ciri khas bentuk rumah serta tradisinya. Masyarakatnya memiliki kehidupan arif dalam mengelola kawasan adat yang masih terjaga kelestariannya. Perbedaan strata sosial pada perkampungan ini masih sangat jelas terlihat, cerminannya ada pada rumah adat yang digolongkan.

Keseluruhan penduduk yang mendiami perkampungan tersebut sangat terbuka akan adanya orang asing untuk mengenal lebih dekat kebudayaan mereka. Segala aktifitas sehari-harinya dilakukan secara tradisional karena belum terjamah oleh modernitas. Faktor tersebut dikarenakan letak perkampungannya yang masih terisolasi dari hiruk pikuk kota.

Perjalanan menuju kawasan adat Perkampungan Tua Tradisional Balla Peu mengandung aspek kepariwisataan minat khusus, terdiri dari potensi alam, perkampungan tua tradisional Balla Peu yang memiliki masyarakat dengan kearifan lokalnya. Rute perjalanan menuju kawasan adat melintasi jajaran pegunungan yang penuh dengan pohon pinus dan pohon kopi. Sesekali dalam perjalanan ditemui penduduk lokal yang sedang berjalan kaki dari Kota Mamasa menuju perkampungan Balla Peu. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kendaraan umum yang lalu lalang menuju Kota Mamasa.

Sarana jalan yang ada saat ini masih buatan penduduk setempat, berupa pengerasan menggunakan batu gunung seadanya yang tercampur aduk dengan tanah liat. Sehingga ketika melintasi, dibutuhkan kehati-hatian dalam berkendara karena salah sedikit dapat terjatuh ke jurang. Jalan yang dibuat mengikuti kontur tanah dan berkelok-kelok, ruas jalannya memiliki sisi turun dan pendakian dengan kemiringan cukup tinggi serta diselingi oleh tebing yang cukup terjal. Diperlukan adrenalin kuat untuk mencapainya dan kendaraan yang dapat melaluinya berupa roda dua dan roda empat namun akan lebih baik jika menggunakan kendaraan off road atau modifikasi khusus.

Secara keseluruhan perjalanan menuju objek pariwisata Balla Peu cukup menantang dengan memerlukan waktu. Terlebih lagi ketika ingin mengelilingi perkampungan tua Balla Peu yang memiliki hutan adat, sawah adat, pemakaman (batutu), banua, alang dan tempat ternak. Para wisatawan akan terpujau dengan pemandangan yang masih elok untuk dipandang dan didukung oleh sejuknya udara.

Arkeologi dan Pariwisata

Keinginan dalam membentuk sebuah produk wisata yang berbasis tinggalan arkeologi tidaklah mudah. Dibutuhkan kemasan yang menarik perhatian wisatawan untuk datang. Telah diuraikan sebelumnya tinggalan-tinggalan arkeologis di Perkampungan Tua Balla Peu Mamasa sebagai salah satu potensi utama untuk menarik wisatawan datang.

Pemanfaatan harus direncanakan secara bersama dengan stakeholder terkait sehingga dapat menciptakan keterkaitan, baik peran dalam pelestarian maupun pemanfaatan. Selain itu, juga diharapkan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat lokal. Pelestarian yang dilakukan tidak sekedar melestarikan fisik, tetapi juga melestarikan budayanya. Berdasarkan peluang pemanfaatan wisata Perkampungan Tua Balla Peu, dapat dilakukan pengelolaan secara efektif, akomodatif dan berkelanjutan. Stakeholder harus bersama-sama dalam menentukan kebijakan pemanfaatan dan menegosiasikan kepentingan bersama. Selama ini kebijakan pelestarian dan pemanfaatan dominan dilakukan oleh pemerintah, saat inilah kebijakan pelestarian dan pemanfaatan tidak dapat lagi diputuskan sepihak oleh instansi pemerintah, akan tetapi perlu pengaruh masyarakat sehingga diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

Penutup

Perkampungan Tua Balla Peu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu objek wisata. Panorama alam dan lingkungan yang masih hijau, tinggalan tradisi budaya megalitik serta masyarakat yang masih hidup dengan berpegang teguh tradisi nenek moyang mereka. Akses menuju objek tinggalan arkeologi yang akan dijadikan modal wisata sangat menantang. Jalan yang dilalui masih jauh dari kesempurnaan seperti di kota. Potensi alam dan potensi budaya yang dimiliki oleh Perkampungan tua Balla Peu ini, mungkin tidak dapat menjadi objek wisata bagi semua kalangan. Namun, untuk para pemerhati budaya, petualang, penjelajah maupun peneliti merupakan objek yang sering dikunjungi. Maka dari itu, tidak ada salahnya jika kawasan tersebut dikembangkan menjadi salah satu objek wisata minat khusus di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Daftar Pustaka

- Anonim**, 2012. *Pendataan Cagar Budaya Di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat*. Makassar: Balai Pelestarian Cagar Budaya.
- Pitana, I Gde dan Cecep Rukendi**. 2009. Kebijakan Pariwisata Berbasis Alam di Indonesia. Dalam *Jurnal Kepariwisata Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata. Badan Pengembangan Sumber Daya Bupdar.
- Rahardjo, Supratikno dan Wiwin Djuwita dan Kresno Yulianto**. 2012. Model Pengelolaan Situs Arkeologi Untuk Memaksimalkan Pemanfaatan Publik : Studi Kasus Kawasan Trowulan. Dalam *Arkeologi Untuk Publik*. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Jakarta : Wedatama Widya Sastra.
- Soekadijo**. 1997. *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage")*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Spillane, Dr. James J**. 1994. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Yondri, Lutfi**. 2012. Potensi Arkeologi Dan Pengembangan Wisata Kawasan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam *Arkeologi Untuk Publik*. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Jakarta : Wedatama Widya Sastra.

BANGUNAN KANTOR WALIKOTA MAKASSAR

Sejarah dan Nilai Penting

Oleh : Mohammad Natsir

A. Sejarah Munculnya Pemukiman/Perkantoran Bernuansa Kolonial Di Kota Makassar

Pendudukan Kolonial Belanda di Makassar pada awalnya di dasarkan pada Perjanjian Bongaya yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin di pihak kerajaan Gowa dan Cornelis Speelman di pihak Belanda. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 18 November 1667. Salah satu pasal dalam perjanjian itu, merupakan tonggak awal pendudukan Belanda di Makassar yakni pasal 11 yang bunyinya sebagai berikut :

“Benteng Jumpandang bersama perkampungan dan tanah yang termasuk lingkungannya akan diserahkan kepada Kompeni, Loji Kompeni akan didirikan kembali “ (Darawan M. Rahman dan Moh. Natsir, 1993 : 83).

Belanda kemudian menjadikan Benteng Ujung Pandang sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan. Sejak pendudukan itu, Kolonial Belanda mulai mendirikan bangunan-bangunan dengan arsitektur yang bernuansa lain dengan arsitektur bangunan yang dikenal oleh masyarakat Bugis Makassar saat itu. Bangunan-bangunan dalam benteng yang sebelumnya berbentuk rumah tradisional Makassar diganti dengan bangunan bernuansa Eropa. Bangunan-bangunan itulah yang masih dapat disaksikan dalam Kompleks Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) hingga sekarang. Selain itu, kolonial Belanda juga mulai membangun sarana dan prasarana pelabuhan seperti kantor, gudang, galangan kapal dan lain-lain dan di bangun di luar Benteng Ujung Pandang. Sejak pendudukan itu pula nama Benteng Ujung Pandang diganti “Fort Rotterdam”. Nama itu diambil dari kota kelahiran Cornelis Speelman di Kota Rotterdam Belanda.

Seiring dengan semakin kokohnya pendudukan kolonial dan aglomerasi kota Makassar yang semakin luas dan berkembang, maka pendirian bangunan-bangunan baik bangunan pemerintah maupun pribadi semakin marak. Walaupun perkembangan itu tidak terlalu banyak berubah hingga abad ke XVIII, Belanda tetap menjadikan Benteng Ujung Pandang sebagai kastel dan lingkungan permukiman yang eksklusif.

Pada awal abad XIX benteng Ujung Pandang yang telah diubah namanya menjadi Fort Rotterdam tidak lagi sepenuhnya difungsikan sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan, kediaman Gubernur mulai di bangun di luar Benteng yakni di Hogepad kira-kira 200 meter sebelah timur laut Fort Rotterdam. Bangunan itu kini difungsikan sebagai kantor Polwiltabes Makassar.

Melengkapi perkembangan kota yang semakin kompleks, setelah status Makassar menjadi Gemeente dan di mulainya politik Desentralisasi, semakin banyak bangunan-bangunan penting yang didirikan seperti hotel dan fasilitas rekreasi seperti Bioskop dan gedung perkumpulan (Harmoni Sociteid), termasuk pembangunan Kantor Gubernur Celebes. Kantor Gubernur itulah yang sekarang digunakan sebagai Kantor Walikota Makassar.

Dalam tahun 1930-an sampai akhir masa pemerintahan Belanda tahun 1942 Kota Makassar berkembang semakin pesat. Makassar menjadi kota pelabuhan, kota dagang, pendidikan, pusat pemerintahan dan pusat militer Belanda. Perkembangan itu ditandai dengan dibangunnya kantor pelayaran, perdagangan, hotel, bioskop, Bank, kantor-kantor pemerintah, gudang, rumah dan toko. Dengan demikian perkembangan Makassar sebagai sebuah kota semakin nampak.

Mengacu pada asumsi dasar itu, sehingga dalam suatu kajian tentang arsitektur kota Makassar (Anonim, 1991/1992) dikemukakan empat periode sejarah perkotaan di Indonesia.

Periode pertama, adalah munculnya pemukiman-pemukiman tradisional yang banyak dipengaruhi oleh budaya India dan Cina (Anonim, 1991/1992). Periode itu berkembang hingga abad ke IX Masehi.

Periode kedua, dimulai dari abad IX sampai abad ke XV, yakni munculnya pusat-pusat kerajaan dan pemerintahan Kerajaan, seperti Kerajaan Gowa, Tallo dan lain-lain. Bukti-bukti arkeologi tentang pusat kota raja abad ke XIV, seperti kerajaan Gowa di Bukit Tamalate, dengan jelas dikemukakan dalam buku Lontarak Gowa-Tallo. Kalau dibandingkan dengan kerajaan – kerajaan di luar Sulawesi seperti Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, maka penataan kota Raja, masih dalam bentuk Intra Muros seperti Keraton Majapahit adalah Intra Muros dikelilingi oleh dinding (Anonim, 1991/1992 : 2). Dalam periode itu di Sulawesi Selatan dikenal pusat kerajaan Gowa Tamalate. Pusat kerajaan Gowa Tamalate oleh sejarawan lokal dipastikan telah berfungsi sejak

abad ke XIV bahkan ada yang menyebut abad ke XIII (Lihat Mattulada, 1982 :19, Anonim, 1991/1992 : 9, Darmawan dan M. Natsir, 1993 : 55, Daud Limbugau, 1985 : 19-25).

Periode ketiga, berlangsung dari abad ke XV sampai abad ke XVIII. Periode itu ditandai oleh munculnya kota-kota pantai yang berbasis kehidupan kemaritiman. Kota pantai bukan saja sebagai pusat pemukiman, akan tetapi juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pelayaran. Makassar saat itu juga berkembang sebagai Kota Maritim, bahkan telah menjadi Bandar internasional. Perkembangan yang sama di Jawa dikenal seperti Demak, Tuban, Gresik, Jakarta, Banten. Kota-kota tersebut bahkan telah dikuasai oleh orang Eropa pada abad ke XVIII (1780) seperti Semarang, Jepara dan Batavia /Jakarta (Anonim,1991-1992 : 2). Pada periode itu juga berkembang pusat-pusat kerajaan Islam seperti Yoyakarta, Kartasura dan Surakarta.

Dalam kurun waktu itu yakni abad ke XV sampai abad ke XVIII di Makassar dikenal kota Somba Opu. Somba Opu sebagai pusat kerajaan Gowa dari sisi politik merupakan tahap pertama pertumbuhan kota pantai Makassar. Dalam suatu kajian tentang Kota Pantai Makassar, dikemukakan tiga tahap perkembangan Kota Pantai Makassar (Darmawan dan M. Natsir, 1993 : 23).

- Tahap pertama, sejak terbentuknya Bandar Barombong (Somba Opu) sebagai pusat kerajaan Gowa dan sekaligus sebagai kota dagang internasional.
- Tahap kedua, yakni pergeseran dan berdirinya Bandar dan tumbuhnya perkampungan di sekitar Benteng Ujung Pandang. Dikuasainya Benteng Ujung Pandang oleh Belanda, kemudian diikuti oleh terbentuknya pemukiman-pemukiman orang asing seperti Belanda, Inggris, Denmark, termasuk Asia Timur Jauh dan perkampungan-perkampungan orang-orang pribumi. Berdasarkan bukti-bukti fisik bangunan yang masih ada hingga saat ini, pengaruh pemukiman-pemukiman orang asing di Makassar yang dikenal dengan bangunan masa kolonial, tumbuh dan berkembang hingga awal abad ke XX. Bukti itu ditandai oleh banyaknya bangunan yang dibangun dengan ciri/langgam arsitektur kolonial, khususnya kolonial Belanda.
- Tahap ketiga, yakni penataan tata fisik bangunan dan arsitektur oleh orang-orang pribumi sejak masa kemerdekaan.
- Periode keempat dari perkembangan sejarah perkotaan di Indonesia, yakni abad ke XIX dan XX, disebut periode pertumbuhan pemukiman dan kota-kota di Indonesia. Periode itu

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1991-1992. *Pola Perkembangan Kota dan Arsitektur Ujung Pandang*. Proyek penelitian dan survey terapan 1991-1992. Ujung Pandang : Bappeda Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.
- Abbas Novida, 1998. Hasil Seni Bangunan Bergaya Indis Studi Kasus Kelestarian Sejumlah Benteng di Jawa Tengah. Dalam Berkala Arkeologi, tahun ke XIII Edisi No.2/November 1998. Yogyakarta : Balai Arkeologi.
- Basang, Djirong (ed). *Pengkajian (Transliterasi dan Terjemahan) Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok (Naskah Makassar)*. Ujung Pandang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan La Galigo.
- Rahman, Darmawan Mas'ud dan Mohammad Natsir, 1993. *Pertumbuhan Kota Pantai Makassar*. Ujung Pandang : Pemda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan.
- Gunadi, 2000. Restropeksi Pengelolaan Sumberdaya Budaya Satu Studi Kasus Tentang Upaya Pelestarian Sumberdaya Budaya di Makassar. Buletin Somba Opu Volume 6 No. 9 Juni 2000. Ujung Pandang : Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
- Mohammad Natsir, dkk. 2000. *Daftar Bangunan Kolonial di Kota Makassar*. Ujung Pandang : Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
- Soekiman, Djoko, 2000. *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*. Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya.

Diterbitkan Oleh



**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
MAKASSAR**